

**ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM ANTI *FRAUD* DALAM MENCEGAH
RISIKO KECURANGAN PADA PT BPR DANAGUNG YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Aulia Nanda Zhafira

No. Mahasiswa: 21312075

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025

**ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM ANTI *FRAUD* DALAM MENCEGAH
RISIKO KECURANGAN PADA PT BPR DANAGUNG YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh;

Nama: Aulia Nanda Zhafira

No. Mahasiswa: 21312075

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 23 Mei 2025

Penulis,



(Aulia Nanda Zhafira)

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM ANTI *FRAUD* DALAM MENCEGAH
RISIKO KECURANGAN PADA PT BPR DANAGUNG YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

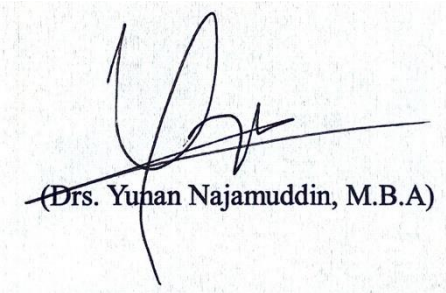
Nama: Aulia Nanda Zhafira

No. Mahasiswa: 21312075

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 23 Mei 2025

Dosen Pembimbing,


(Drs. Yunan Najamuddin, M.B.A)

BERITA ACARA UJIAN

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Empiris Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Era Disrupsi Digital

Disusun oleh : AULIA NANDA ZHAFIRA

Nomor Mahasiswa : 21312075

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 03 Juni 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Yunan Najamuddin, Drs., MBA., CMA., CAPF

Penguji : Rizki Hamdani, SE., Ak., M.Ak.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.

MOTTO

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri.”*

(Q.S. Ar-Ra'd : 11)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang sangat menyayangi dan mencintai saya dengan penuh ketulusan dan kasih sayang. Papa

Fifit dan Mama Tutik.

Serta saya persembahkan juga untuk almarhumah ibu saya yang sangat saya

cintai, Hetty Fitrianingsih.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahrabbi'l'alamin. Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Efektivitas Sistem Anti *Fraud* Dalam Mencegah Risiko Kecurangan pada PT BPR Danagung Yogyakarta**”. Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Strata-1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Selama perjalanan studi dan penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak dukungan, doa, dan bantuan dari banyak pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW selaku pedoman kepada umat manusia untuk memperkenalkan kebesaran Allah SWT.
3. Almarhumah ibunda tercinta, Hetty Fitrianingsih. Meskipun beliau tidak bisa mendampingi selama masa pendidikan kuliah, beliau tetap menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Papa Fitri Adi Nugroho dan Mama Tutik Purwanti, selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan cinta, dukungan, dan doa tanpa henti selama masa perkuliahan hingga saat ini.
5. Kakakku, Aji Wirasakti Setiawan dan kakak iparku Gizkha Aisyah Adinda, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan arahan selama penulis mengerjakan skripsi.
6. Kedua ponakan penulis yang lucu, Yves Adzriel Andara dan Kavi Alfareezel Andara yang selalu menghibur penulis dikala penulis sedang merasa jenuh.
7. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
9. Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS, ASPM selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
10. Bapak Drs. Yunan Najamuddin, MBA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, memberi masukan, saran, dan nasihat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat di kemudian hari.

11. PT BPR Danagung Yogyakarta selaku objek penelitian, yang telah memberikan izin dan mendukung proses penelitian ini dengan memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.
12. Seluruh dosen dan staff Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
13. Muhammad Haris Fattah, yang selalu mendengar keluh kesah penulis dan selalu memberikan dukungan, semangat, serta menemani penulis dalam setiap perjalanan yang penulis hadapi.
14. Seluruh keluarga *Marketing and Communications* FBE UII, terutama *Creative and Social Media Team* 2022/2023 dan 2023/2024 yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan pengalaman yang berharga kepada penulis.
15. Teman-temanku Denona Mumtaza, Zakia Putri, dan Mbak Shafa, yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 23 Mei 2025

Penulis,

(Aulia Nanda Zhafira)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Fokus Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II.....	8
KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Keagenan	8
2.1.2 Fraud	10
2.1.3 Bank Perekonomian Rakyat (BPR)	15
2.1.4 Sistem Anti <i>Fraud</i>	16
2.2 Penelitian Terdahulu	26
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN.....	29

3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Objek Penelitian.....	30
3.3 Instrumen Penelitian.....	30
3.4 Sumber Data	30
3.4.1 Dokumen	31
3.4.2 Wawancara	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Teknik Analisis Data	33
3.6.1 Coding.....	33
3.6.2 Concept Map	35
3.6.3 Matrix Coding	36
3.7 Uji Keabsahan Data.....	36
BAB IV	38
HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Profil PT BPR Danagung Yogyakarta.....	38
4.1.1 Sejarah PT BPR Danagung Yogyakarta	38
4.1.2 Visi dan Misi	39
4.1.3 Produk dan Layanan	39
4.1.4 Struktur Organisasi PT BPR Danagung.....	43
4.2 Struktur dan Mekanisme Penerapan Sistem Anti <i>Fraud</i> PT BPR	45
Danagung Yogyakarta.....	45
4.2.1 Mekanisme Penerapan Sistem Anti <i>Fraud</i> PT BPR Danagung Yogyakarta.....	45
4.3 Kekurangan dan Kendala pada Penerapan Sistem Anti <i>Fraud</i> PT BPR.....	62
Danagung Yogyakarta.....	62
4.3.1 Kekurangan	63
4.3.2 Kendala	64
4.4 Upaya Perbaikan Penerapan Sistem Anti <i>Fraud</i> pada PT BPR Danagung .	65
Yogyakarta	65
BAB V.....	67
PENUTUP	67

5.1 Kesimpulan Penelitian.....	67
5.2 Keterbatasan Penelitian	68
5.3 Saran Penelitian.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Narasumber Wawancara.....	32
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Fraud Tree	12
Gambar 2. 2 The Fraud Diamond	14
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT BPR Danagung Yogyakarta.....	44
Gambar 4. 2 Matrix Coding Mekanisme Penerapan Sistem Anti Fraud PT BPR Danagung Yogyakarta.....	46
Gambar 4. 3 Peta Analisis Mekanisme Penerapan Sistem Anti Fraud PT BPR Danagung Yogyakarta.....	47
Gambar 4. 4 Peta Analisis Kekurangan dan Kendala Penerapan Sistem Anti Fraud PT BPR Danagung Yogyakarta.....	62
Gambar 4. 5 Peta Analisis Upaya Perbaikan Penerapan Sistem Anti Fraud pada PT BPR Danagung Yogyakarta.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem anti *fraud* yang dijalankan oleh PT BPR Danagung Yogyakarta efektif dalam mencegah terjadinya kecurangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tiga narasumber utama yang terlibat langsung dalam pengawasan dan pelaksanaan strategi anti *fraud*, serta melalui dokumentasi internal perusahaan. Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12, yang mencakup proses *coding* tematik dan pemetaan konsep. Hasil temuan menunjukkan bahwa penerapan sistem telah mencakup empat pilar utama strategi anti *fraud*, yakni pencegahan, deteksi, investigasi dan sanksi, serta evaluasi dan tindak lanjut. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah kelemahan seperti keterbatasan pelatihan yang merata, rotasi pegawai yang belum berjalan optimal, serta identifikasi risiko *fraud* yang masih bersifat reaktif. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk memperkuat program pelatihan, memperjelas kebijakan rotasi, dan mengembangkan mekanisme penilaian risiko yang lebih proaktif.

Kata kunci: anti *fraud*, pencegahan kecurangan, BPR, evaluasi risiko, NVivo

ABSTRACT

This study aims to evaluate the extent to which the anti-fraud system implemented at PT BPR Danagung Yogyakarta is effective in preventing fraudulent practices. Employing a qualitative approach, data were gathered through in-depth interviews with three key informants directly involved in fraud monitoring and control, as well as through internal documentation. The data were analyzed using NVivo 12 software, including thematic coding and concept mapping. The findings indicate that the current anti-fraud system incorporates four strategic pillars: prevention, detection, investigation and sanctions, and monitoring with follow-up actions. Nonetheless, some weaknesses persist, including uneven training access, suboptimal staff rotation practices, and a predominantly reactive approach to fraud risk identification. It is recommended that the company enhance its training programs, establish clearer rotation policies, and develop a more proactive fraud risk assessment mechanism.

Keywords: *anti fraud, fraud prevention, rural bank, risk evaluation, NVivo*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2020) dalam *Report to the Nations 2020*, kecurangan didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan sengaja mengalihkan atau menyalahgunakan aset serta kekayaan perusahaan. *Fraud* atau kecurangan merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh institusi perbankan, termasuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Kecurangan dalam sektor perbankan dapat berdampak besar terhadap reputasi, kepercayaan nasabah, serta stabilitas keuangan perusahaan. *Fraud* tidak hanya dilakukan oleh pihak eksternal, tetapi juga sering kali melibatkan pihak internal seperti karyawan, manajemen, atau pihak-pihak yang memiliki akses ke sistem perbankan. Kondisi ini membuat perbankan, termasuk BPR, perlu memiliki strategi anti *fraud* yang efektif untuk mengantisipasi, mendeteksi, dan menangani berbagai potensi risiko yang muncul.

Menurut survei *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), lebih dari 50% kasus *fraud* terjadi di organisasi kecil hingga menengah, termasuk BPR, yang menunjukkan bahwa risiko *fraud* merupakan ancaman nyata bagi kelangsungan usaha BPR.

Kasus *fraud* di sektor perbankan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakin sering terjadi. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),

pada tahun 2020, sekitar 23% serangan siber yang terjadi di Indonesia menasar sektor keuangan. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya 7.087 laporan kasus fraud di industri perbankan dalam periode semester pertama tahun 2020 hingga semester pertama tahun 2021. Dari jumlah tersebut, 71,6% kasus terjadi di bank umum, 28% di bank swasta, dan 0,3% di bank asing. Akibat kejahatan siber ini, total kerugian yang dialami sektor perbankan mencapai Rp246,5 miliar, sementara kerugian nasabah mencapai Rp11,8 miliar.

Menanggapi permasalahan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 pada 19 Desember 2019, yang mengatur penerapan strategi anti-fraud untuk bank umum. Selain itu, OJK juga mengatur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melalui Peraturan OJK Nomor 04/POJK.03/2015 mengenai tata kelola BPR. Meskipun kegiatan BPR lebih terbatas dibandingkan dengan bank umum—karena tidak diperbolehkan untuk menerima simpanan giro, melakukan transaksi valuta asing, atau menawarkan layanan asuransi—BPR tetap berada di bawah pengawasan OJK. OJK juga menyediakan panduan mengenai strategi anti-fraud untuk BPR, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang manajemen risiko dan tata kelola di sektor ini, baik untuk BPR itu sendiri maupun bagi nasabahnya.

Menurut Statistik Perbankan Indonesia per Desember 2021, terdapat 1.468 BPR yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan 69 di antaranya berlokasi di Jawa dan Bali (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). PT BPR Danagung, yang terletak di Kabupaten Sleman, memiliki visi untuk menjadi bank yang sehat, berkembang, modern, produktif, efisien, dan dipercaya oleh masyarakat serta para pemangku

kepentingan. Dengan komitmen pada layanan perbankan yang profesional dan berintegritas tinggi, PT BPR Danagung berfokus pada membangun hubungan jangka panjang yang penuh kepercayaan dan rasa aman. Strategi anti *fraud* di PT BPR Danagung menjadi tanggung jawab Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko, dan Komite Remunerasi, yang memastikan pengambilan keputusan selalu memperhatikan risiko. Sementara itu, berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat tren peningkatan kasus *fraud* di sektor publik atau instansi pemerintahan dari tahun ke tahun. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang audit internal agar mampu mendeteksi serta mencegah tindak kecurangan secara optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem anti *fraud* di PT BPR Danagung Yogyakarta dalam mencegah risiko kecurangan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh PT BPR Danagung Yogyakarta dalam implementasi sistem anti *fraud* untuk mencegah risiko kecurangan?
3. Apa upaya perbaikan yang dapat dilakukan oleh PT BPR Danagung Yogyakarta untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem anti *fraud*?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang mampu memberikan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah serta sesuai dengan tujuan penelitian, penulis menetapkan fokus kajian penelitian sebagai berikut:

1. Tempat Penelitian: PT BPR Danagung, Jalan Solo KM 11, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55521
2. Aspek Penelitian: Mekanisme penerapan sistem anti *fraud* mengenai pencegahan dan pendeteksian *fraud* dalam upaya mencegah risiko kecurangan pada PT BPR Danagung Yogyakarta
3. Waktu Penelitian: 1 Januari 2025 – 30 April 2025
4. Objek Penelitian: Penerapan sistem anti *fraud* yang dilaksanakan oleh pihak yang memiliki tanggung jawab di PT BPR Danagung Yogyakarta

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, penulis memiliki tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan dan efektivitas sistem anti *fraud* yang diterapkan di PT BPR Danagung Yogyakarta dalam mencegah risiko kecurangan, sehingga penulis dapat memperoleh informasi tentang mekanisme yang diimplementasi pada PT BPR Danagung Yogyakarta.

2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh PT BPR Danagung Yogyakarta pada penerapan sistem anti *fraud* dalam mencegah risiko kecurangan.
3. Untuk merumuskan upaya perbaikan yang bisa dilakukan oleh PT BPR Danagung Yogyakarta dalam meningkatkan keberhasilan penerapan sistem anti *fraud* dalam mencegah risiko kecurangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kebermanfaatan untuk berbagai pihak, termasuk:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan sistem anti *fraud* serta upaya peningkatan kualitas audit internal dalam mencegah risiko kecurangan.

2. Bagi PT BPR Danagung Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat membantu PT BPR Danagung Yogyakarta untuk mengevaluasi sejauh mana sistem anti *fraud* yang diterapkan selama ini efektif dalam mencegah risiko kecurangan. Selain itu, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem anti *fraud*, sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis mengenai pentingnya sistem anti *fraud* dalam mencegah risiko kecurangan, sehingga dapat diadopsi atau dijadikan inspirasi oleh lembaga perbankan lainnya untuk meningkatkan sistem pengendalian internal mereka. Selain itu, dapat memperkaya literatur dan kajian akademis terkait sistem anti *fraud*, risiko kecurangan, dan pengelolaan risiko di sektor keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dari penelitian yang menyajikan gambaran secara umum mengenai topik yang akan diteliti. Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi kerangka teori yang merupakan kumpulan konsep-konsep relevan yang terintegrasi dalam satu sistem penjelasan. Dalam bab ini, hasil penelitian sebelumnya akan dikemukakan untuk memberi gambaran pengetahuan yang mendasari pelaksanaan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, akan dijelaskan secara terperinci tahapan penelitian dan bagaimana penelitian dilakukan. Bab ini menjelaskan jenis penelitian, objek penelitian, instrumen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya yang mengaitkan dengan kerangka teori dan/atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan alat analisis yang telah disiapkan sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari isi pokok skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penulisan, dan saran untuk penelitian di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan salah satu teori yang sering digunakan dalam penelitian bidang akuntansi dan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen dengan pihak yang diberikan tanggung jawab (agen). Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 dan telah menjadi salah satu landasan konseptual utama dalam memahami terjadinya konflik kepentingan antara pihak prinsipal dan agen.

Berdasarkan pendapat Eisenhardt (1989), teori keagenan dilandasi oleh 3 asumsi yaitu: (1) asumsi mengenai sifat dasar manusia menyoroti bahwa individu cenderung mengutamakan kepentingan pribadi (*self-interest*), memiliki kemampuan rasional yang terbatas (*bounded rationality*), serta cenderung menghindari risiko (*risk aversion*), (2) asumsi terkait organisasi mencakup adanya potensi konflik antar anggota organisasi, penggunaan efisiensi sebagai tolok ukur produktivitas, serta ketimpangan informasi (*information asymmetry*) antara pihak pemberi tugas (prinsipal) dan pelaksana (agen), dan (3) asumsi mengenai informasi

menyatakan bahwa informasi dianggap sebagai suatu komoditas yang dapat diperdagangkan.

Dalam praktiknya, agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Agen cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya, terutama jika terdapat kelemahan pada sistem pengawasan dan pengendalian. Pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR), situasi tersebut dapat membuka peluang bagi agen untuk melakukan kecurangan (*fraud*), seperti memanipulasi transaksi, menyalahgunakan wewenang dalam pemberian kredit, atau melakukan penggelapan dana.

Menurut pendapat Kholmi (2011), dalam teori agensi terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik (prinsipal) dan manajemen (agen). Oleh karena itu, hubungan antara keduanya menimbulkan konsekuensi bahwa manajemen memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh prinsipal.

Maka dari itu, penelitian ini memanfaatkan teori keagenan sebagai dasar untuk menguraikan pentingnya penerapan sistem anti *fraud* dalam mengurangi risiko terjadinya kecurangan, khususnya yang dilakukan oleh pihak internal BPR selaku agen. Penerapan sistem anti *fraud* yang semakin efektif akan memperkecil kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang oleh agen yang dapat

merugikan kepentingan prinsipal serta mengancam kelangsungan operasional BPR.

2.1.2 Fraud

2.1.2.1 Definisi Fraud

Berdasarkan laporan *Report to the Nations 2020* yang diterbitkan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE Global, 2020) kecurangan diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melalui pemanfaatan atau penggelapan aset perusahaan. *Fraud* atau kecurangan merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh institusi perbankan, termasuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 mengenai Penerapan Strategi Anti Fraud pada Lembaga Jasa Keuangan menyatakan bahwa fraud merupakan tindakan menyimpang dan/atau pembiaran yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menipu, memanipulasi, atau mengecoh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), konsumen, maupun pihak lain. Tindakan ini dapat terjadi di dalam lingkungan LJK dan/atau memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh LJK, sehingga menyebabkan kerugian bagi LJK, konsumen, atau pihak terkait lainnya, serta memberikan keuntungan, baik secara

langsung maupun tidak langsung, kepada pelaku fraud atau pihak lain.

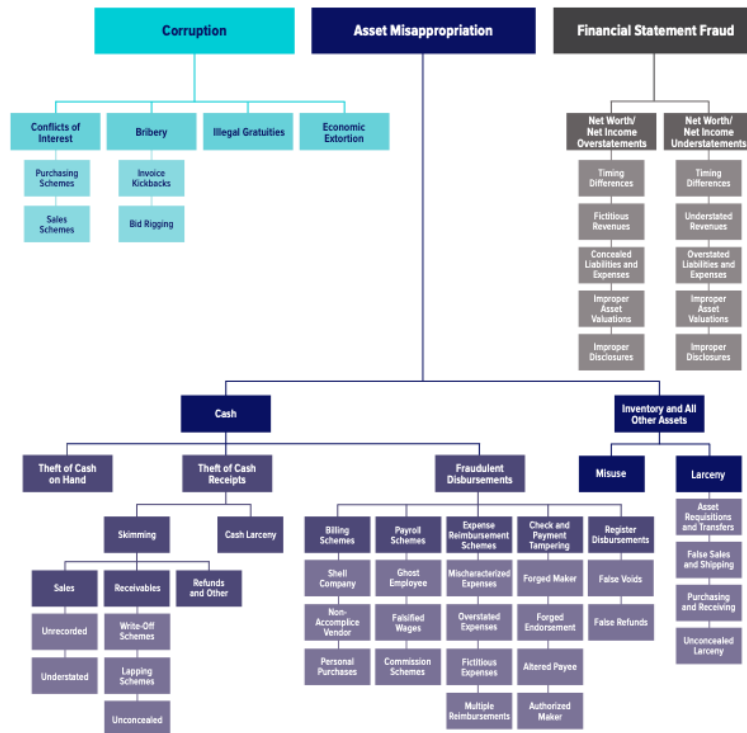
Menurut pernyataan Anisa (2012), tindakan *fraud* sering ditemukan dalam lingkungan organisasi, baik di sektor perusahaan maupun pemerintahan. Secara umum, *fraud* di dalam perusahaan merujuk pada perbuatan curang yang dilakukan secara sengaja dan berlandaskan pada ketidakjujuran, yang bisa dilakukan oleh siapa pun, termasuk karyawan ataupun manajemen. Perilaku ini dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial, dan dalam jangka panjang, kerugian akibat fraud tersebut bahkan bisa mengarah pada kebangkrutan perusahaan.

2.1.2.2 Klasifikasi Fraud

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengklasifikasikan *fraud* dalam bentuk skema *fraud tree*.

Gambar 2. 1 Fraud Tree

FIG. 3 OCCUPATIONAL FRAUD AND ABUSE CLASSIFICATION SYSTEM (THE FRAUD TREE)³



Berdasarkan skema yang ditampilkan, dapat diketahui bahwa *occupational fraud* terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan pemaparan ACFE yang dikutip oleh Tuanakotta (2013), kecurangan atau *fraud* dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis utama berdasarkan bentuk tindakannya, yaitu:

1. Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) merupakan penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah

dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung

2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statement*), merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif dalam suatu perusahaan maupun lembaga pemerintah dengan tujuan menyembunyikan kondisi keuangan yang sesungguhnya. Hal ini biasanya dilakukan melalui manipulasi data atau informasi dalam laporan keuangan agar tampak lebih baik demi meraih keuntungan tertentu.
3. Korupsi, merupakan bentuk *fraud* yang tergolong paling sulit untuk diidentifikasi karena melibatkan kolaborasi dengan pihak lain. Jenis kecurangan ini banyak terjadi di negara-negara berkembang, terutama yang memiliki sistem penegakan hukum yang lemah serta minimnya kesadaran terhadap pentingnya prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

2.1.2.3 Faktor Penyebab Terjadinya Fraud

Wolfe & Hermanson (2004) memperkenalkan *fraud diamond model* sebagai versi ekstensi dari *fraud triangle*. Model ini menambahkan “*capability*” sebagai faktor risiko *fraud* keempat. Teori *fraud diamond* memberikan

informasi mengenai faktor yang mendorong individu untuk melakukan kecurangan.

Gambar 2. 2 *The Fraud Diamond*



Unsur-unsur *fraud diamond* yaitu:

1. Tekanan (*Pressure*), merujuk pada adanya dorongan, kebutuhan, atau desakan tertentu yang mendorong seseorang melakukan kecurangan, baik karena faktor finansial maupun non-finansial.
2. Peluang (*Opportunity*), menggambarkan adanya kondisi atau celah dalam sistem yang memungkinkan seseorang untuk melakukan *fraud* tanpa segera terdeteksi.
3. Rasionalisasi (*Rationalization*), sikap atau pola pikir yang membuat pelaku merasa bahwa tindakan curangnya dapat dibenarkan, sehingga mereka secara sadar memutuskan untuk bertindak tidak jujur.
4. Kemampuan (*Capability*), mengacu pada kapasitas atau kompetensi individu yang memegang peran penting dalam terjadinya *fraud*, di mana individu tersebut mampu mengidentifikasi kelemahan sistem,

mengeksplotasinya, dan melakukan kecurangan secara berkelanjutan.

Menurut Wolfe & Hermanson (2004) peluang merupakan faktor yang memungkinkan terjadinya penipuan (*fraud*), sementara insentif dan rasionalisasi berperan dalam mendorong seseorang untuk melakukannya. Namun, berdasarkan teori *fraud diamond*, individu tersebut juga harus memiliki kompetensi atau kemampuan untuk mengidentifikasi adanya peluang yang bisa dimanfaatkan.

2.1.3 Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan jenis bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah, namun dalam operasinya tidak menyediakan jasa transaksi giro secara langsung. Lingkup kegiatan BPR lebih terbatas dibandingkan dengan bank umum, karena BPR dilarang untuk menerima simpanan giro, melakukan transaksi valuta asing, serta aktivitas asuransi. BPR berfokus memberikan layanan perbankan kepada berbagai lapisan masyarakat hingga ke daerah-daerah terpencil, termasuk melayani segmen usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (MKM) (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia per Desember 2021, terdapat sebanyak 1.468 BPR yang tersebar di

seluruh wilayah Indonesia. Mayoritas dari BPR tersebut berlokasi di Pulau Jawa dan Bali, dengan proporsi mencapai 69% dari total BPR di Indonesia.

Menurut buku panduan strategi anti *fraud* yang ditulis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022), seiring berjalannya waktu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia menunjukkan tren penurunan setiap tahunnya, sebagaimana tercermin dari data OJK. Dari tahun 2014 hingga Desember 2021, jumlah BPR menurun sebesar 10,6%, dari 1.643 menjadi 1.468 unit. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh proses penggabungan dan peleburan BPR sebagai bagian dari upaya konsolidasi yang dilakukan oleh OJK untuk memperkuat industri BPR. Namun, perlu diperhatikan bahwa selama periode tersebut, penurunan jumlah BPR juga terjadi akibat proses pencabutan izin usaha (CIU). Hal yang menjadi perhatian serius bagi OJK dan pelaku industri BPR adalah bahwa sekitar 60% dari BPR yang terkena pencabutan izin tersebut mengalami permasalahan terkait *fraud*.

2.1.4 Sistem Anti *Fraud*

Dalam upaya meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan nilai-nilai etika umum di industri perbankan, PT BPR Danagung menjalankan kegiatan usahanya dengan mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate*

Governance (GCG), yang mencakup keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran di setiap level organisasi. Sehubungan dengan hal ini, PT BPR Danagung telah menyusun Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang berjudul Standar Prosedur dan Operasional Strategi Anti Fraud. Pedoman ini dirancang untuk menjadi acuan dalam pencegahan, pengidentifikasian, pendeteksian, pelaporan, serta perbaikan berkelanjutan pada sistem pengendalian internal yang berkaitan dengan tindakan *fraud* (Bank Perekonomian Rakyat Danagung, 2023).

Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang disusun oleh PT BPR Danagung memiliki tujuan yaitu:

1. Sebagai bagian dari kepatuhan PT BPR Danagung terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
2. Sebagai ketentuan pelaksanaan dari Kebijakan dan Pedoman Umum Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) serta Kebijakan dan Pedoman Umum Manajemen Risiko.
3. Sebagai dasar tindakan yang diambil oleh PT BPR Danagung dalam melakukan bentuk pencegahan terhadap terjadinya Fraud yang dapat merugikan bank

secara finansial dan non finansial serta dapat mempengaruhi kinerja operasional bank secara keseluruhan termasuk reputasi bank.

4. Memberikan arah kebijakan dan prosedur dalam tingkat kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya *fraud* maupun kesadaran risiko terhadap aktivitas kegiatan Bank.
5. Untuk menerapkan peraturan dasar yang berlaku di PT BPR Danagung bahwa segala bentuk tindakan *fraud* tidak dapat diterima dan tidak dapat ditoleransi apa pun alasannya. Siapa pun di dalam perusahaan yang melakukan tindakan *fraud*, tanpa terkecuali akan menerima sanksi dan/atau konsekuensi dari perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT BPR Danagung serta ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud yang dimiliki oleh PT BPR Danagung, strategi anti *fraud* merupakan bagian dari kebijakan *fraud* yang ada dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud* yang mana memiliki empat pilar sebagai berikut: a) pencegahan; b) deteksi; c) investigasi, pelaporan, dan sanksi; d) pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

2.1.4.1 Pencegahan

PT BPR Danagung memandang bahwa upaya pencegahan jauh lebih penting karena mencegah agar *fraud* tidak terjadi lebih baik dari pada penanganan *fraud* yang telah terjadi (Bank Perekonomian Rakyat Danagung, 2023).

Pilar pencegahan memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya *fraud*, yang mencakup:

1. Kesadaran anti *fraud*

Kesadaran anti *fraud* adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *fraud* bagi seluruh jajaran organisasi bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan bank. Melalui kepemimpinan yang baik dan didukung dengan kesadaran anti *fraud* yang tinggi, diharapkan tumbuh kepedulian semua unsur di bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan bank terhadap pentingnya pengendalian *fraud*. Moral dan kesadaran dari pimpinan terhadap anti *fraud* harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang ditetapkan. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran anti *fraud* dilakukan antara lain melalui:

- a) Penyusunan dan sosialisasi deklarasi anti *fraud*

- b) Program budaya anti *fraud* bagi pegawai
- c) Program kepedulian dan kewaspadaan terhadap *fraud* bagi nasabah
- d) Program kesadaran rekanan (*vendor/supplier awareness program*)

2. Identifikasi Kerawanan

Identifikasi kerawanan merupakan proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya *fraud*. Secara umum, identifikasi kerawanan ditujukan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya *fraud* yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan bank. Hasil identifikasi didokumentasikan dan diinformasikan kepada pihak yang berkepentingan dan selalu dikinikan terutama terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya *fraud*.

3. Kebijakan mengenal pegawai / *Know Your Employee* (KYE)

Sebagai upaya pencegahan terjadinya *fraud*, kebijakan *know your employee* merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM.

2.1.4.2 Deteksi

Pilar deteksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasikan dan menemukan *fraud*, yang mencakup:

1. Kebijakan dan mekanisme penanganan pengaduan (*Whistleblowing*)

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan. *Whistleblowing System* yang efektif untuk mendorong partisipasi pegawai dan masyarakat agar berani bertindak dalam mencegah terjadinya pelanggaran (termasuk *fraud*) dengan melaporkannya kepada pihak yang dapat menangannya.

2. Pemeriksaan Dadakan (*Surprise Audit*)

Kebijakan dan mekanisme *surprise audit* perlu dilakukan terutama pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya *fraud*. Pelaksanaan *surprise audit* dapat meningkatkan kewaspadaan pegawai dalam melaksanakan tugasnya. *Surprise audit* diharapkan akan membangun kesadaran para pegawai bahwa apa

yang mereka lakukan setiap saat bisa saja diketahui. Hal ini akan membuat pegawai takut jika tertangkap melakukan *fraud*, sehingga diharapkan akan mengurangi perilaku *fraud* di bank.

3. Sistem Pengawasan (*Surveillance System*)

Sistem pengawasan (*surveillance system*) merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan secara rahasia tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti *fraud*.

2.1.4.3 Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

a. Investigasi

Investigasi adalah upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui/membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian. Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *fraud*. Investigasi merupakan bagian penting dalam

sistem pengendalian *fraud* yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *fraud* yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Pelaporan

Setiap *fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap bank dan/atau nasabah bank yang nilai kerugiannya signifikan, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik, wajib dilaporkan. Pelaporan tersebut tidak mengurangi kewajiban bank untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan strategi anti *fraud* yang dimiliki, yaitu:

- 1) Dari laporan hasil investigasi (berkoordinasi dengan Divisi Audit Internal), apabila ditemukan adanya pelanggaran, unit atau fungsi anti *fraud* akan berkoordinasi dengan unit kerja terkait lainnya untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama. Direktur Utama kemudian akan memutuskan langkah selanjutnya, apakah kasus tersebut diteruskan ke proses hukum atau diselesaikan secara internal.

- 2) Mekanisme pelaporan meliputi penyampaian laporan secara internal kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan, serta juga dapat dilaporkan kepada OJK.
- 3) Setiap laporan *fraud* yang memiliki dampak signifikan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat dalam waktu sepuluh hari kerja setelah bank mengetahui adanya kejadian *fraud* tersebut.

c. Pengenaan Sanksi

Bank akan menerapkan pengenaan sanksi secara *intern* yang efektif dalam rangka menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku *fraud*. Kebijakan pengenaan sanksi akan diterapkan secara transparan dan konsisten. Memberikan sanksi yang jelas dan tegas yang akan mengurangi perilaku tidak jujur. Sanksi yang tegas dan konsisten akan membuat pegawai berpikir sebelum melakukan *fraud*.

2.1.4.4 Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

a. Pemantauan

Salah satu langkah penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *fraud*

adalah memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian-kejadian yang diindikasi/dicurigai *fraud*, baik sesuai ketentuan *intern* bank maupun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Evaluasi

Berdasarkan data kejadian *fraud* dan hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *fraud* serta ditentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian *intern*. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian *fraud* perlu dilakukan secara berkala.

c. Tindak Lanjut

Mekanisme tindak lanjut atas kejadian *fraud* digunakan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian *intern* agar dapat mencegah terulangnya kembali *fraud* karena kelemahan yang serupa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada bab ini, peneliti akan mengkaji penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Penelitian terdahulu akan dijadikan acuan perbandingan untuk mengevaluasi efektivitas strategi anti *fraud* yang akan diimplementasikan.

Menurut Himawan, A., & Siswantoro (2023) dalam “Evaluasi Penerapan Strategi Anti *Fraud* Pada Bank XYZ” menjelaskan mengenai penelitian mengenai penerapan strategi anti *fraud* di Bank XYZ berdasarkan empat pilar sesuai ketentuan OJK menemukan bahwa pilar pencegahan telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan. Selain itu, pilar deteksi serta pilar investigasi, pelaporan, dan pemberian sanksi juga telah diterapkan secara efektif. Namun, pelaksanaan pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut masih kurang optimal. Hal ini menandakan perlunya peningkatan di area tersebut agar strategi anti fraud di Bank XYZ dapat berjalan lebih efektif.

Menurut Asmara et al., (2020) dalam “Kebijakan dan Implementasi Strategi Anti-*Fraud* pada Bank Umum” menjelaskan tentang penerapan kebijakan strategi anti *fraud* pada PT Bank X Indonesia masih sebatas normatif belum substansif. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh PT Bank X Indonesia meliputi rendahnya kesadaran pegawai dalam melaporkan indikasi kecurangan, minimnya rotasi pegawai, kesulitan dalam menjaga kerahasiaan informasi terkait audit mendadak, serta pola rekrutmen yang tidak mencakup materi tentang kesadaran terhadap fraud. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, PT Bank X Indonesia dapat melakukan beberapa perbaikan, seperti menerapkan sistem penghargaan berupa promosi bagi pegawai yang berkomitmen dalam menjaga budaya anti fraud. Selain itu,

manajemen perlu mempertimbangkan kembali kebijakan rotasi pegawai, tim auditor, baik internal maupun eksternal, yang ditugaskan di kantor cabang atau capem, dapat mempersiapkan akomodasi secara terpusat. Terakhir, dalam proses rekrutmen pegawai baru, penting untuk menyertakan materi yang berkaitan dengan kesadaran *fraud*.

Menurut Khoirunnisa & Dwi Aristi (2023) dalam “Implementasi Manajemen Risiko Sebagai Strategi Anti *Fraud* di PT BRI Kanca Sudirman Pekanbaru” menerangkan bahwa di PT BRI KC Sudirman Pekanbaru, penerapan manajemen risiko dalam strategi anti *fraud* telah dilakukan sesuai dengan peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 yang mengatur manajemen risiko untuk bank umum, serta POJK No. 39/POJK.03/2019 yang memberikan pedoman untuk strategi anti *fraud* di bank umum. Implementasi yang baik dari manajemen risiko di institusi ini telah menyebabkan penurunan tingkat kejadian *fraud*, yang dibuktikan oleh laporan tahunan PT Bank Rakyat Indonesia tahun 2021. Selain itu, Branch Risk and Compliance (BRC) di PT BRI KC Sudirman Pekanbaru berusaha maksimal untuk mendukung karyawan dalam mengatasi berbagai risiko yang ada. Kolaborasi antara BRC dan karyawan BRI KC Sudirman Pekanbaru telah efektif dalam menangani risiko-risiko yang muncul, sehingga persentase kejadian *fraud* menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya karena objek yang diteliti berbeda. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada bank umum yang berada di luar Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan sistem anti *fraud* di bank yang bukan bank

umum, khususnya di Bank Perekonomian Rakyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan sumber data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang terlibat serta dokumen pendukung dari PT BPR Danagung Yogyakarta. Data yang dikumpulkan akan diolah menggunakan aplikasi NVivo 12 untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap isi penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. “Gaya” penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Sehingga, penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas (Somantri, 2005). Menurut pernyataan Firmansyah et al. (2021), jika pertanyaannya berkaitan dengan alasan terjadinya suatu fenomena, bagaimana prosesnya, dan memerlukan jawaban yang mendetail serta penelusuran yang mendalam, maka penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tepat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa pernyataan dari narasumber (informan).

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif melalui interaksi dengan narasumber agar mendapat informasi sesuai dengan keadaan di lapangan. PT BPR Danagung Yogyakarta yang menjadi objek dari penelitian ini diteliti mengenai efektivitas sistem anti *fraud* yang diterapkan dalam mencegah risiko kecurangan. Selain itu, penulis juga membandingkan kebijakan dalam Buku Panduan Strategi Anti *Fraud* yang diterbitkan oleh OJK mengenai mekanisme penerapan strategi anti *fraud* untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem anti *fraud* diterapkan dan kendala yang dihadapi oleh PT BPR Danagung Yogyakarta, serta langkah-langkah perbaikan untuk PT BPR Danagung Yogyakarta kedepannya.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan di PT BPR Danagung Yogyakarta yang mana akan membahas mengenai sistem anti *fraud* yang diterapkan oleh PT BPR Danagung Yogyakarta dalam upaya mencegah risiko kecurangan. Pembahasan secara rinci dalam penelitian ini akan didasarkan pada hasil observasi dan wawancara dengan para narasumber. Narasumber yang terlibat meliputi Direktur Kepatuhan; Pejabat Eksekutif Satuan Kerja Kepatuhan Manajemen Risiko dan APU PPT; dan Pejabat Eksekutif Satuan Kerja Audit Internal.

3.3 Instrumen Penelitian

Dalam proses pengolahan data dalam penelitian kualitatif, penulis berperan sebagai instrumen penelitian. Menurut Sugiyono (2019), dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang bertugas untuk menentukan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, serta melakukan pengumpulan dan penilaian kualitas data. Selain itu, peneliti juga bertanggung jawab untuk menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh.

3.4 Sumber Data

Data penelitian disesuaikan dengan tujuan dan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dokumen dan wawancara. Informasi yang diperoleh secara lisan dapat diverifikasi dengan data yang

dikumpulkan dalam bentuk dokumen untuk memastikan keakuratan dan konsistensinya.

3.4.1 Dokumen

Berikut adalah beberapa dokumen yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

1. Buku Panduan Strategi Anti *Fraud* Bagi Industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan
3. Standar Prosedur dan Operasional (SPO) Strategi Anti *Fraud* PT BPR Danagung Yogyakarta

3.4.2 Wawancara

Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai tiga orang yang memiliki pengetahuan dan pekerjaan yang berkaitan dengan sistem anti *fraud* di PT BPR Danagung Yogyakarta. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun beberapa partisipan yang telah melakukan wawancara dengan penulis yaitu:

1. Bapak Fitri Adi Nugroho selaku Direktur Kepatuhan
2. Ibu Yuniarti selaku Pejabat Eksekutif Satuan Kerja Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT

3. Bapak Yustinus Indria Dewantara selaku Pejabat Eksekutif Satuan Kerja Audit Internal

Tabel 3. 1 Narasumber Wawancara

Narasumber	Jenis Kelamin	Jabatan	Kelompok Usia
Bapak Fitri Adi Nugroho	Pria	Direktur Kepatuhan	45-50 tahun
Ibu Yuniarti	Wanita	Pejabat Eksekutif Satuan Kerja Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT	45-50 tahun
Bapak Yustinus Indria Dewantara	Pria	Pejabat Eksekutif Satuan Kerja Audit Internal	45-50 tahun

Sumber: Data PT BPR Danagung Yogyakarta

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik pengumpulan data yang mencakup wawancara dan analisis dokumen. Metode ini mendukung penulis dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Teknik-teknik yang digunakan meliputi:

1. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme penerapan sistem anti *fraud* di PT BPR Danagung Yogyakarta.
2. Sebagai pelengkap data primer, penulis juga berupaya mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan implementasi sistem anti *fraud* di PT BPR Danagung Yogyakarta.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Setelah pengumpulan data selesai, penulis menganalisis informasi tersebut untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Untuk mengolah data berupa dokumen dan transkrip wawancara, penulis menggunakan perangkat lunak NVivo 12. Dengan NVivo 12, penulis dapat mengidentifikasi hubungan antar data dari berbagai sumber, serta mengurangi subjektivitas dan potensi bias dalam hasil wawancara. Meskipun demikian, penulis tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas pembahasan dan kesimpulan yang dihasilkan, sesuai dengan perannya sebagai instrumen utama dalam penelitian.

3.6.1 Coding

Analisis data kualitatif diawali dengan mentranskrip data ke format teks, yang selanjutnya dianalisis melalui proses *coding*. *Coding* adalah istilah yang biasa digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori untuk menghasilkan *code*/kode berupa kata,

frasa, atau teks. *Coding* dibutuhkan untuk menunjukkan keterkaitan antara data yang didapat dengan analisis yang dihasilkan.

Menurut pendapat Soraya (2024), *coding* merupakan proses pemberian kode berdasarkan tema-tema tertentu yang disusun dan disajikan dalam bentuk seperti *word frequency query*, *word tree*, *project map*, dan format lainnya sesuai dengan kebutuhan analisis. Dalam melakukan *coding*, penulis perlu menyusun terlebih dahulu kriteria pengkodean yang akan dijadikan acuan dalam memberikan kode pada data penelitian.

Pada tahap *coding* menggunakan NVivo, data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber di PT BPR Danagung Yogyakarta serta dokumen SPO strategi anti *fraud* yang dimiliki oleh PT BPR Danagung Yogyakarta dimanfaatkan sebagai sumber informasi. Data tersebut kemudian diolah untuk membentuk representasi yang dikenal dengan istilah *nodes*. Dalam proses ini, *nodes* dikembangkan untuk menyimpan seluruh informasi yang berasal dari wawancara dan dijadikan sebagai bahan referensi. Melalui *nodes* tersebut, pemahaman terhadap konsep dan keterkaitan antar tema dapat diperoleh. Setiap *nodes* yang dihasilkan disusun dengan menyesuaikan pada rumusan masalah dalam penelitian. Dengan demikian, *node-node* tersebut merefleksikan jawaban dari isu-isu yang telah dirumuskan sebelumnya. Permasalahan mengenai kendala dalam penerapan sistem anti *fraud*

di PT BPR Danagung Yogyakarta kemudian dihubungkan dengan langkah-langkah perbaikan melalui fitur *relationship* dalam NVivo.

Selain itu, penulis membuat *case node* yang berfungsi untuk menyimpan transkrip wawancara dan memisahkan antara tanggapan partisipan dengan pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Hubungan antar *nodes* yang saling berkaitan, seperti *nodes* yang merujuk pada rumusan masalah kedua dan ketiga, juga dibangun oleh penulis. Hubungan ini mencerminkan adanya kaitan antara kekurangan, kendala, dan upaya perbaikan dalam pelaksanaan sistem anti *fraud* yang diterapkan oleh PT BPR Danagung Yogyakarta.

3.6.2 Concept Map

Setelah kode-kode dibuat, penulis menggunakan *concept maps* dalam NVivo untuk memvisualisasikan hubungan antar kode dan tema. Visualisasi ini dapat membantu penulis memahami keterkaitan antar tema, bagaimana tema-tema tersebut saling melengkapi, serta menggambarkan bagaimana keseluruhan tema membentuk suatu narasi yang utuh.

Berdasarkan pemahaman penulis menurut Miles et al. (2019), *node* digunakan untuk merepresentasikan ide, kategori, atau tema yang ditemukan dalam data, sedangkan garis mengilustrasikan relasi antara masing-masing konsep tersebut. *Concept maps* yang disusun oleh penulis berfungsi untuk memberikan pemahaman

mengenai bagaimana sistem anti *fraud* diterapkan, berbagai kekurangan serta kendala yang dihadapi, dan usulan perbaikan terhadap penerapan anti *fraud* di PT BPR Danagung Yogyakarta.

3.6.3 Matrix Coding

Dalam proses *matrix coding*, penulis terlebih dahulu menyusun tabel dalam bentuk matriks yang memuat berbagai kode atau tema pada baris dan kolomnya. Setelah itu, dilakukan analisis untuk mengidentifikasi keterkaitan antar kode yang ada. Melalui pendekatan ini, penulis mampu menggali secara lebih mendalam bagaimana sistem anti *fraud* diterapkan di PT BPR Danagung, serta mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kekurangan dan kendala yang muncul, sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber dalam wawancara.

3.7 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan langkah krusial dalam penelitian untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya dan valid. Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji melalui beberapa metode, termasuk triangulasi dan *member check*. Triangulasi adalah teknik yang digunakan oleh penulis untuk memverifikasi data dengan memanfaatkan lebih dari satu sumber atau metode. Dalam konteks penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen terkait. Menurut Denzin (1978), penggunaan triangulasi dapat meningkatkan keandalan dan validitas data

dengan memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

Selain itu, *member check* juga diterapkan dalam penelitian ini, di mana penulis meminta partisipan untuk memeriksa dan mengonfirmasi data serta interpretasi yang telah dikumpulkan. Tujuan dari *member check* adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan pandangan dan pengalaman partisipan. Lincoln & Guba (1985) menyatakan bahwa *member check* merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan keabsahan data kualitatif. Dengan menerapkan metode-metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai fenomena yang diteliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil PT BPR Danagung Yogyakarta

4.1.1 Sejarah PT BPR Danagung Yogyakarta

Sejarah PT BPR Danagung diawali dari didirikannya BPR Danagung Ramulti pada tahun 1991 oleh Rachmad Ali di Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1995 mendirikan BPR Danagung Bakti, lalu pada tahun 2004 mendirikan BPR Danagung Abadi.

Seiring berkembangnya waktu dan semakin bertambah besarnya ketiga BPR tersebut, pada tanggal 10 November 2023 BPR Danagung Group melakukan aksi korporasi penggabungan dimana BPR Danagung Bakti dan BPR Danagung Abadi bergabung kedalam BPR Danagung Ramulti yang kemudian berubah nama menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Danagung pada 18 Desember 2023 berdasar keputusan KEMENKUMHAM No AHU-0079052.AH.01.02.Tahun 2023.

Dengan penggabungan ketiga BPR tersebut semakin memperluas cakupan bisnis bank, inovasi produk, dan layanan nasabah lebih optimal.

4.1.2 Visi dan Misi

a. Visi

Visi PT BPR Danagung adalah menjadi bank yang tumbuh dan sehat berkembang, besar dan modern, produktif dan efisien serta menjadi tumpuan dan kepercayaan *stakeholder*.

b. Misi

Misi PT BPR Danagung yaitu membangun kemitraan dan hubungan jangka panjang dengan nasabah, mewujudkan pelaksanaan tata kelola yang baik agar dapat memberikan nilai tambah kepada *stakeholder*, beradaptasi terhadap dinamika perkembangan perubahan bisnis dan regulasi, serta pemenuhan kompetensi SDM yang profesional dan berintegritas.

4.1.3 Produk dan Layanan

PT BPR Danagung Yogyakarta menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan bagi nasabahnya, termasuk produk seperti tabungan, kredit, dan deposito. Untuk tabungan, PT BPR Danagung Yogyakarta menawarkan beberapa produk, yaitu:

Tabungan Aristadana	Tabungan yang menggabungkan konsep menabung dengan sistem arisan. Produk ini menawarkan setoran Rp50.000,00 per bulan, bebas biaya administrasi, bunga 2% per tahun,
---------------------	--

	serta kesempatan mengikuti undian bulanan, dan Gebyar Aristadana senilai Rp12.000.000,00.
Tabungan Beasiswa	Tabungan yang diprioritaskan untuk simpanan biaya pendidikan anak, dengan setoran awal Rp50.000,00, bunga 4% per tahun, bebas biaya administrasi, dan jangka waktu minimal 1 tahun.
Danagung Plus	Tabungan bersama yang diselenggarakan oleh anggota Danagung Group. Tabungan ini menawarkan berbagai keuntungan, seperti bunga kompetitif 2% per tahun, fasilitas kartu ATM jaringan ATM Bersama, dan kesempatan mengikuti undian berhadiah menarik setiap bulan Juli.
Tamasya	Tabungan Masyarakat Yogyakarta Plus adalah tabungan bersama dari 45 BPR se-DIY. Dengan setoran awal Rp50.000,00, bunga 2% per tahun, fasilitas ATM Danagung, serta kupon undian berkala dengan hadiah utama mobil dan hadiah menarik lainnya.
Tabungan Rakyat (TARA)	Tabungan yang diselenggarakan oleh 7 BPR di Jawa Tengah dan DIY yang tergabung dalam Badan Kerjasama TARA “Manunggal Abadi”. Setoran awal Rp50.000,00, bunga 2% per tahun,

	fasilitas ATM Danagung, dan kupon undian berkala dengan hadiah utama mobil Toyota Agya dan hadiah menarik lainnya.
Tabungan Umum	Tabungan untuk perorangan atau badan dengan setoran awal Rp50.000,00, bunga 3% per tahun, saldo mengendap minimal Rp10.000,00, dan fasilitas ATM Danagung (ATM Bersama).
TabunganKu	Tabungan khusus perorangan untuk mendorong budaya menabung, dengan setoran awal Rp20.000,00, bunga 2% per tahun, saldo minimal Rp20.000,00, dan bebas biaya administrasi bulanan.

Sumber: bankdanagung.id

Selain tabungan, produk lain yang ditawarkan oleh PT BPR Danagung adalah kredit. Kredit yang ditawarkan oleh PT BPR Danagung meliputi kredit angsuran, kredit insidentil/sebrakan, dan kredit tanpa agunan. Beberapa layanan kredit angsuran yang ditawarkan bagi para pelaku bisnis di DIY, meliputi kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumtif, hingga kredit *back to back*. Sedangkan kredit insidentil/sebrakan merupakan fasilitas pinjaman jangka pendek dari PT BPR Danagung yang ditujukan bagi pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan modal kerja musiman. Kredit ini memiliki tenor maksimal 12 bulan, dengan

skema pembayaran yang ringan, nasabah hanya membayar bunga setiap bulan, sedangkan pokok pinjaman dibayarkan di akhir masa kredit. Berbeda dengan kredit tanpa agunan, yaitu fasilitas pinjaman dari PT BPR Danagung yang ditujukan bagi masyarakat Yogyakarta tanpa memerlukan jaminan. Pinjaman ini dirancang sebagai dana talangan untuk kebutuhan modal usaha, dengan jangka waktu maksimal 12 bulan dan plafon hingga Rp5.000.000,00.

Selain kredit, produk lainnya yang ditawarkan oleh PT BPR Danagung adalah deposito. Deposito ditujukan bagi perorangan maupun badan usaha dengan setoran awal minimal Rp5.000.000,00. Pembukaan rekening dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi permohonan. Simpanan nasabah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank.

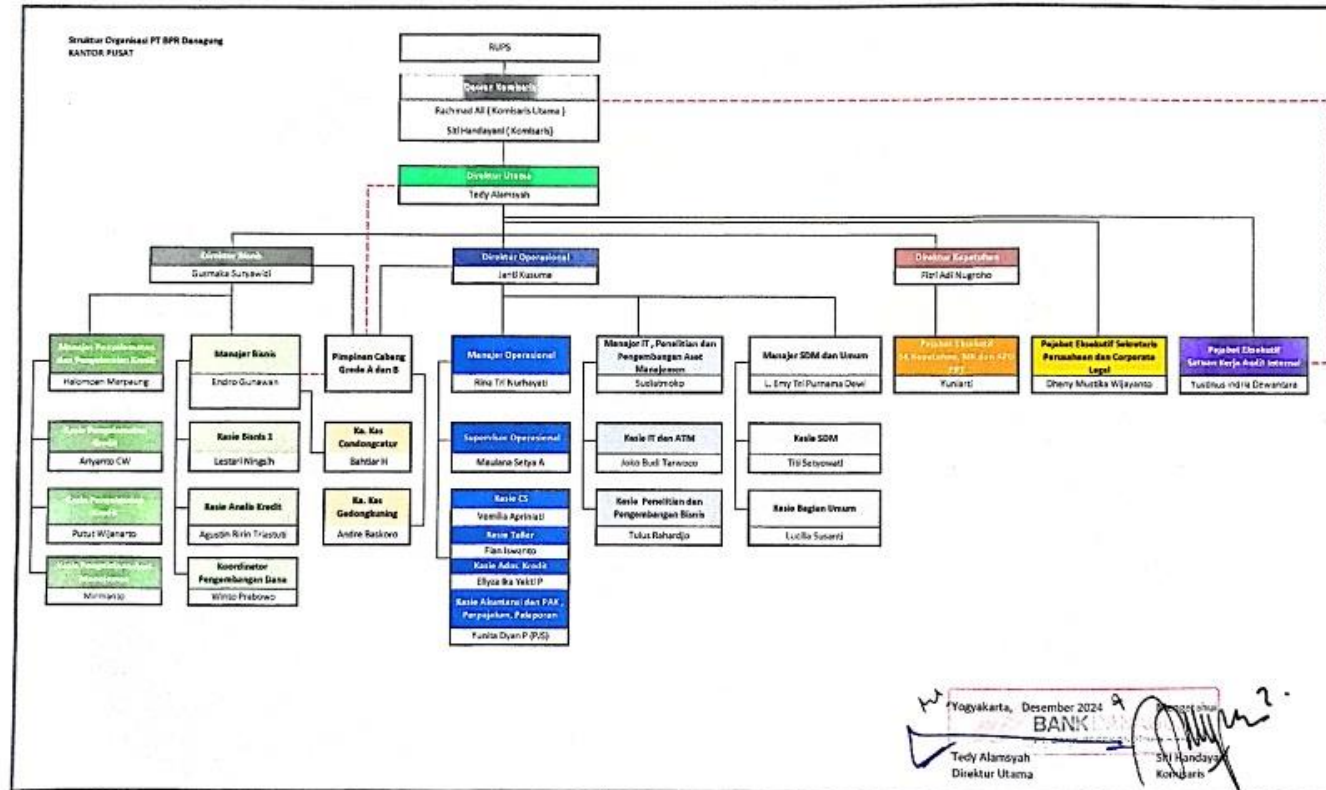
Adapun layanan yang ditawarkan oleh PT BPR Danagung adalah ATM. ATM Danagung Cash adalah layanan unggulan yang memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi perbankan. Kartu ini terhubung dengan jaringan ATM Danagung dan ATM Bersama yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Fitur layanan yang tersedia meliputi informasi saldo, tarik tunai, transfer dana, serta pembayaran tagihan listrik dan telepon. PT BPR Danagung juga menggunakan teknologi untuk meningkatkan layanan programnya. Mereka membuat platform digital bernama

Danagung GO untuk memberikan informasi dan membantu pelanggan mengajukan kredit.

4.1.4 Struktur Organisasi PT BPR Danagung

Berikut adalah stuktur organisasi yang dimiliki oleh PT BPR Danagung Yogyakarta:

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT BPR Danagung Yogyakarta



Sumber: Narasumber (Pak Fitri Adi)

4.2 Struktur dan Mekanisme Penerapan Sistem Anti *Fraud* PT BPR

Danagung Yogyakarta

4.2.1 Mekanisme Penerapan Sistem Anti *Fraud* PT BPR Danagung Yogyakarta

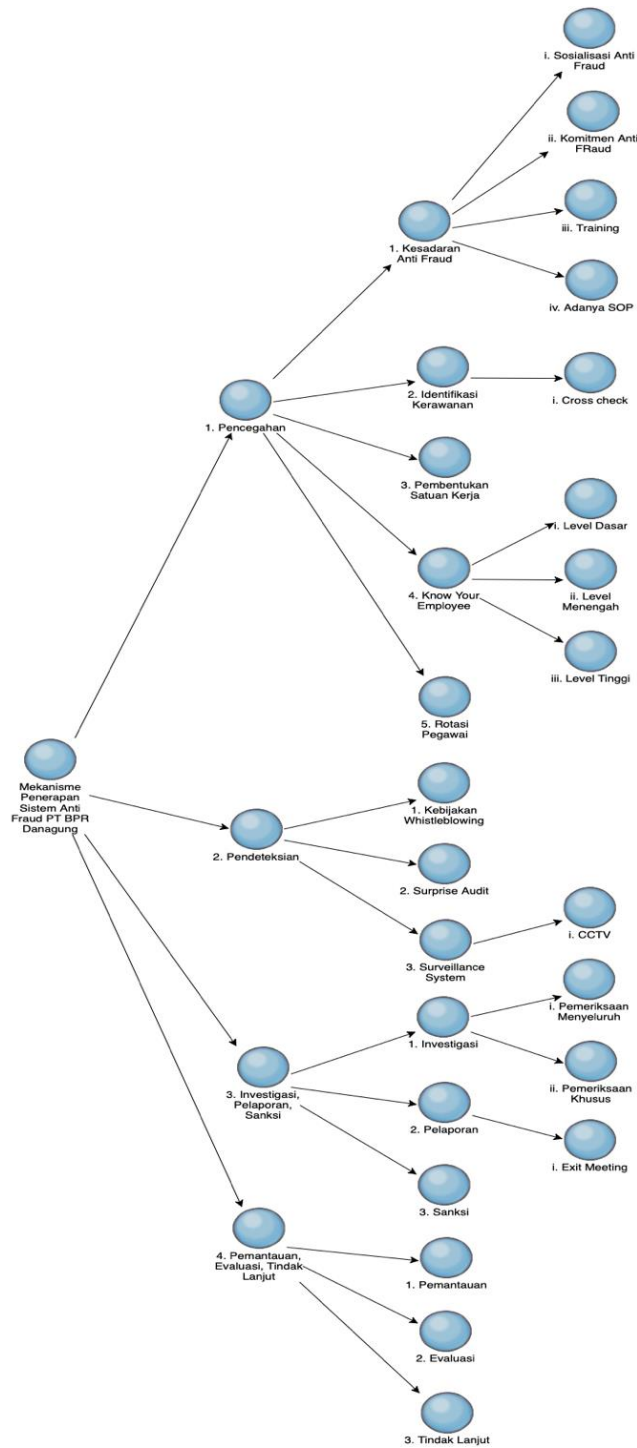
Pada bagian ini akan dibahas bagaimana PT BPR Danagung Yogyakarta menerapkan sistem anti *fraud*. Bagian ini akan membahas metode apa yang digunakan, siapa saja yang bertanggung jawab, serta upaya yang dilakukan untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani *fraud*. Berikut ini merupakan data yang telah dikumpulkan dan telah diproses menggunakan aplikasi NVivo 12:

**Gambar 4. 2 Matrix Coding Mekanisme Penerapan Sistem Anti *Fraud* PT
BPR Danagung Yogyakarta**

	A : Bapak Fitri Adi	B : Bapak Yustinus	C : Ibu Yuniarti
1 : Mekanisme Penerapan Sistem Ant...	0	0	0
2 : 1. Pencegahan	0	0	0
3 : a. Kesadaran Anti Fraud	0	0	1
4 : i. Sosialisasi Anti Fraud	0	0	1
5 : ii. Komitmen Anti FRaud	1	0	0
6 : iii. Training	3	0	1
7 : iv. Adanya SOP	2	0	1
8 : b. Identifikasi Kerawanan	0	0	2
9 : i. Cross check	0	0	1
10 : c. Pembentukan Satuan Kerja	0	2	0
11 : d. Know Your Employee	0	0	0
12 : i. Level Dasar	0	0	1
13 : ii. Level Menengah	0	0	1
14 : iii. Level Tinggi	0	0	1
15 : e. Rotasi Pegawai	0	0	1
16 : 2. Pendeteksian	0	0	0
17 : a. Kebijakan Whistleblowing	1	0	1
18 : b. Surprise Audit	0	1	0
19 : c. Surveillance System	0	0	0
20 : i. CCTV	0	0	1
21 : 3. Investigasi, Pelaporan, Sanksi	0	0	0
22 : a. Investigasi	0	0	0
23 : i. Pemeriksaan Menyeluruh	0	1	0
24 : ii. Pemeriksaan Khusus	0	1	0
25 : b. Pelaporan	0	0	1
26 : i. Exit Meeting	0	1	0
27 : c. Sanksi	0	0	1
28 : 4. Pemantauan, Evaluasi, Tindak...	0	0	1
29 : a. Pemantauan	0	0	1
30 : b. Evaluasi	1	1	1
31 : c. Tindak Lanjut	0	1	1

Sumber: Aplikasi NVivo 12

Gambar 4. 3 Peta Analisis Mekanisme Penerapan Sistem Anti *Fraud* PT BPR Danagung Yogyakarta



Sumber: Aplikasi NVivo 12

4.2.1.1 Pilar Pencegahan pada Mekanisme Penerapan Sistem

***Anti Fraud* PT BPR Danagung Yogyakarta**

Untuk mencegah risiko kecurangan (*fraud*), PT BPR Danagung melakukan langkah pertama berupa upaya pencegahan.

a. Kesadaran Anti *Fraud*

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yuniarti (2025), salah satu upaya PT BPR Danagung untuk meningkatkan kesadaran tentang pencegahan anti *fraud* yaitu dengan meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan sosialisasi, menerapkan aturan dan sanksi tegas, serta memasukkan aspek kepatuhan terhadap anti *fraud* ke dalam penilaian KPI mereka. PT BPR Danagung meningkatkan kesadaran anti *fraud* dengan cara:

i. Sosialisasi Anti *Fraud*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuniarti (2025), dijelaskan bahwa sejauh ini PT BPR Danagung telah melakukan upaya sosialisasi secara singkat kepada pihak-pihak terkait, namun bentuk sosialisasi tersebut belum berkembang menjadi pelatihan khusus yang dirancang secara terstruktur.

ii. *Komitmen Anti Fraud*

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Nugroho (2025) menyampaikan bahwa komitmen manajemen terhadap anti *fraud* diwujudkan secara nyata dalam berbagai aspek oleh PT BPR Danagung. PT BPR Danagung tidak hanya merancang sistem, tetapi juga memastikan implementasinya melalui arahan langsung dari jajaran direksi. Beliau juga menyampaikan bahwa manajemen secara aktif terlibat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terhadap setiap indikasi *fraud* yang muncul.

iii. *Training*

PT BPR Danagung melakukan pelatihan atau *training* kepada karyawannya, baik melalui sosialisasi internal maupun pelatihan yang melibatkan pihak eksternal. Materi pelatihan tidak hanya mengenai definisi *fraud*, tapi juga mencakup cara mengenali tanda-tandanya dan bagaimana melaporkannya. Kedepannya, PT BPR Danagung akan terus

mengembangkan sistem pelatihan yang lebih terstruktur (Yuniarti, 2025). Lebih lanjut, Bapak Nugroho (2025) juga menjelaskan bahwa salah satu hal yang menjadi kendala di PT BPR Danagung adalah belum meratanya kompetensi karyawan dalam penerapan sistem anti *fraud*. Hal ini disebabkan karena belum seluruh karyawan di unit-unit yang bertanggung jawab terhadap sistem ini mendapatkan pelatihan yang sesuai.

iv. Adanya SOP

Salah satu hal yang perlu dilakukan oleh BPR adalah menyusun *Standard Operating Procedure (SOP)* guna mendukung penerapan sistem anti *fraud*, sebagaimana tercantum dalam buku panduan *Anti Fraud* yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2022). Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Nugroho (2025) menyampaikan bahwa PT BPR Danagung sudah memiliki SPO Strategi *Anti Fraud* yang disahkan pada Desember 2023 dan direvisi kembali pada Agustus 2024. Hal ini juga diperkuat oleh Ibu Yuniarti

(2025) bahwa PT BPR Danagung sudah memiliki SOP yang secara khusus mengatur penanganan kecurangan. SOP ini mencakup tahap pencegahan, proses pelaporan, hingga pemberian sanksi. SOP ini juga telah disesuaikan dengan ketentuan terbaru dari OJK maupun internal bank, agar selalu relevan dengan dinamika operasional.

b. Identifikasi Kerawanan

Langkah pencegahan lainnya yang dilakukan oleh PT BPR Danagung yaitu dengan mengidentifikasi risiko terjadinya *fraud* pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan bank (Bank Perekonomian Rakyat Danagung, 2023).

Berdasarkan pernyataan Ibu Yuniarti (2025), identifikasi kerawanan dilakukan melalui beberapa pendekatan. Salah satunya dengan meninjau proses bisnis yang memiliki celah dalam pengendalian, seperti pemrosesan transaksi tunai atau *approval* kredit. Selain itu, PT BPR Danagung juga memanfaatkan data historis temuan audit, hasil evaluasi risiko, serta laporan dari *whistleblowing* untuk memetakan area rawan. Identifikasi

kerawanan ini dilakukan secara berkala, terutama pada proses-proses yang melibatkan transaksi atau akses keuangan. PT BPR Danagung juga menerapkan sistem *cross check* antar unit dan menggunakan hasil evaluasi audit sebelumnya sebagai acuan. Dari situ, titik-titik rawan bisa dipetakan dan diberi pengendalian tambahan.

c. Pembentukan Satuan Kerja

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara dengan Bapak Dewantara (2025) sebagai Pejabat Eksekutif , Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dibentuk sebagai unit pelaksana pemeriksaan internal. SKAI bertugas memantau kegiatan perusahaan, menilai dan menindaklanjuti laporan dari unit kerja maupun masyarakat, serta menjadi mitra strategis bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam mencapai tujuan perusahaan.

“Divisi audit internal memiliki peran strategis. Kami memeriksa apakah setiap kegiatan usaha sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Tugas kami mencakup pengawasan terhadap proses keuangan, pemeriksaan terhadap pemberian dan pengelolaan kredit, serta audit mendadak jika

diperlukan. Selain itu, kami melakukan investigasi bila ditemukan indikasi penyimpangan dan menyampaikan laporan secara langsung kepada Direktur Utama,” ujar Bapak Dewantara (2025).

d. Kebijakan Mengenal Pegawai (*Know Your Employee*)

Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh PT BPR Danagung yaitu dengan kebijakan mengenal pegawai. Tujuan dari kebijakan ini supaya PT BPR Danagung dapat memiliki karyawan dengan personal yang baik dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian bisnis. Terdapat 3 tingkat standar pengenalan pegawai berdasarkan buku panduan *Anti Fraud* yang diterbitkan oleh OJK, yaitu:

i. Level Dasar

Hasil wawancara dengan Ibu Yuniarti (2025), menyampaikan bahwa tahap pertama yang dilakukan PT BPR Danagung dalam proses rekrutmen yaitu dengan meninjau riwayat kerja, melihat kecocokan kompetensi melalui CV dan sertifikasi yang dimiliki, serta menggali pengalaman kerja mereka sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut PT BPR Danagung telah melakukan tahap level

dasar mengenai kebijakan mengenal pegawai sesuai dengan buku panduan anti *fraud* yang diterbitkan OJK.

ii. Level Menengah

Pada tahap level menengah, setiap pelamar akan melalui setidaknya dua tahap wawancara, yaitu bersama tim HRD dan *user* dari unit terkait. Proses ini digunakan untuk mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang calon karyawan (Yuniarti, 2025).

iii. Level Tinggi

Berdasarkan buku panduan Anti *Fraud* yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2022), penerapan tahap *know your employee* pada level tinggi perlu dilakukan khususnya untuk posisi-posisi yang bersifat sensitif. Langkah ini dapat dilakukan melalui konfirmasi kepada atasan di tempat kerja sebelumnya mengenai alasan pengunduran diri pelamar serta memperoleh referensi dan rekomendasi dari manajer sebelumnya. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Ibu Yuniarti (2025), untuk memperkuat validasi,

PT BPR Danagung juga melakukan konfirmasi kepada atasan pelamar di perusahaan sebelumnya. Langkah ini penting agar dapat memastikan integritas calon karyawan sejak awal.

e. Rotasi Pegawai

Upaya lainnya dalam mencegah risiko kecurangan terjadi yaitu dengan melakukan mutasi dan rotasi pegawai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuniarti (2025), PT BPR Danagung menerapkan kebijakan rotasi pegawai sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap praktik kecurangan. Dengan rotasi ini, harapannya dapat meminimalkan peluang penyimpangan yang bisa terjadi akibat seorang pegawai terlalu lama berada di satu posisi yang sama, khususnya di area yang sensitif seperti operasional dan keuangan..

4.2.1.2 Pilar Pendeteksian pada Mekanisme Penerapan Sistem

***Anti Fraud* PT BPR Danagung Yogyakarta**

Untuk mengidentifikasi dan menemukan *fraud*, PT BPR Danagung melakukan upaya pendeteksian agar kecurangan dapat diminimalisir sedini mungkin.

a. Kebijakan *Whistleblowing*

Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pelaporan *fraud*, BPR menetapkan kebijakan *whistleblowing* sebagaimana diarahkan dalam Buku Panduan Strategi Anti *Fraud* untuk BPR yang diterbitkan secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan (2022). Hal ini ditujukan agar penanganan laporan *fraud* dapat dilakukan secara lebih terarah dan transparan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nugroho (2025), PT BPR Danagung juga menerapkan sistem *whistleblowing*. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ibu Yuniarti (2025) yang mengatakan bahwa sampai saat ini PT BPR Danagung tidak menemukan hambatan berarti dalam pelaksanaan sistem *whistleblowing*. Sistem *whistleblowing* sudah berjalan dengan baik dan dapat diterapkan oleh seluruh karyawan.

b. *Surprise Audit*

Surprise audit adalah pemeriksaan keuangan atau operasional yang dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diaudit. Menurut keterangan dari hasil

wawancara dengan Bapak Dewantara (2025) PT BPR Danagung melaksanakan *surprise audit* baik di kantor pusat maupun seluruh kantor cabang. Hal ini dilakukan untuk menguji kesiapan dan konsistensi operasional serta sebagai langkah pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran.

c. Sistem Pengawasan (*Surveillance System*)

Upaya pendeteksian terakhir yang dilakukan oleh PT BPR Danagung yaitu dengan menguji atau melakukan pemeriksaan secara rahasia tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji. Hasil wawancara dengan Ibu Yuniarti (2025) menyatakan bahwa pendeteksian menggunakan sistem CCTV di area-area strategis, terutama yang berhubungan dengan layanan nasabah dan operasional keuangan.

4.2.1.3 Pilar Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi pada

Mekanisme Penerapan Sistem Anti *Fraud* PT BPR Danagung Yogyakarta

a. Investigasi

Investigasi merupakan upaya pengungkapan pertama yang dilakukan oleh PT BPR Danagung untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan

fraud. Berdasarkan buku panduan Anti *Fraud* yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2022), PT BPR Danagung melakukan investigasi yang mencakup:

i. Pemeriksaan Menyeluruh

Saat ada laporan atau indikasi *fraud*, PT BPR Danagung melakukan pemeriksaan menyeluruh. Tahap awal biasanya berupa pengumpulan bukti pendukung (Dewantara, 2025).

ii. Pemeriksaan Khusus

Berdasarkan pernyataan Bapak Dewantara (2025), setelah tahap pengumpulan bukti pendukung, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan ini tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga pada sistem yang memungkinkan terjadinya *fraud*.

b. Pelaporan

Upaya pengungkapan selanjutnya yaitu dengan melakukan pelaporan atas tindakan *fraud* kepada Direktur Utama untuk ditindaklanjuti. Hasil dari wawancara dengan Ibu Yuniarti (2025) menyatakan bahwa proses pelaporan bisa dilakukan secara

langsung melalui atasan masing-masing atau melalui sistem *whistleblowing* yang ada. Laporan akan diteruskan ke unit pengelola dan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Dewantara (2025) yang mengatakan bahwa jika dalam audit ditemukan suatu permasalahan, PT BPR Danagung akan menyampaikannya terlebih dahulu kepada unit kerja terkait saat sesi *exit meeting*. Disitu pihak yang diaudit dapat memberikan tanggapan. Setelah itu, semua hasil—baik temuan, tanggapan, maupun komitmen dari pihak auditee—akan dituangkan ke dalam laporan hasil audit.

c. Sanksi

BPR merancang mekanisme sanksi internal bagi pelaku *fraud* dengan tujuan memberikan efek jera, serta menekankan tanggung jawab pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan kecurangan tersebut (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yuniarti (2025) sanksi diberikan sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan dan semuanya telah diatur secara jelas dalam peraturan perusahaan.

4.2.1.4 Pilar Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut pada Mekanisme Penerapan Sistem Anti *Fraud* PT BPR Danagung Yogyakarta

a. Pemantauan

Upaya pemantauan yang dilakukan PT BPR Danagung bertujuan untuk memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian-kejadian yang diindikasikan/dicurigai *fraud*. Hasil wawancara dengan Ibu Yuniarti (2025) menyatakan bahwa PT BPR Danagung melakukan pemantauan berkala dan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem. Hal ini mencakup pengukuran hasil pelatihan, tingkat pelaporan, serta dampak sistem terhadap pencegahan *fraud*.

b. Evaluasi

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Nugroho (2025) PT BPR Danagung melakukan evaluasi setidaknya satu kali dalam setahun. Namun, bila terdapat laporan indikasi *fraud*, maka evaluasi akan dilakukan segera tanpa menunggu jadwal tahunan tersebut.

“Evaluasi dilakukan melalui beberapa metode. Kami menganalisis data *fraud* untuk melihat tren dan jenis

kejadian, mengukur performa sistem deteksi dan hasil audit rutin, serta menguji sistem pengendalian internal. Kami juga mengevaluasi infrastruktur teknologi dan menggunakan metrik kinerja seperti tingkat deteksi *fraud*, kecepatan respons, serta tingkat pelaporan,” ujar Bapak Dewantara (2025).

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Ibu Yuniarti (2025) unit kerja kepatuhan akan melakukan evaluasi untuk menentukan apakah perlu dilakukan revisi kebijakan, tambahan sosialisasi, atau penerapan sanksi. Langkah-langkah tersebut kemudian dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan unit kerja lain agar implementasinya berjalan efektif.

c. Tindak Lanjut

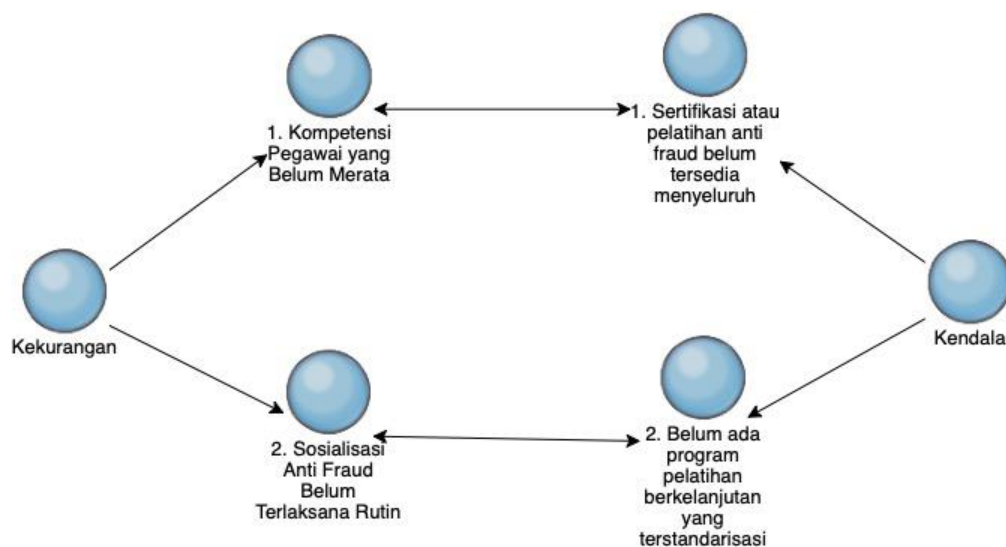
Melalui evaluasi terhadap kasus *fraud* yang terjadi, BPR dapat merumuskan langkah tindak lanjut guna memperkuat pengelolaan risiko *fraud* serta memperbaiki sistem pengendalian internal yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuniarti (2025) apabila ada kelemahan pada sistem, akan segera ditindaklanjuti dengan perbaikan SOP atau penguatan pengendalian internal.

4.3 Kekurangan dan Kendala pada Penerapan Sistem Anti *Fraud* PT BPR

Danagung Yogyakarta

Pembahasan dalam bagian ini difokuskan pada kekurangan dan kendala yang ditemui dalam penerapan sistem anti *fraud*. Dari data yang diolah pada NVivo didapat hasil sebagai berikut:

Gambar 4. 4 Peta Analisis Kekurangan dan Kendala Penerapan Sistem Anti *Fraud* PT BPR Danagung Yogyakarta



Sumber: Aplikasi NVivo 12

4.3.1 Kekurangan

1. Kompetensi pegawai yang belum merata

Kekurangan pertama yang ada pada penerapan sistem anti *fraud* di PT BPR Danagung yaitu belum meratanya kompetensi pegawai terkait pelaksanaan sistem anti *fraud*. Hal ini disebabkan karena belum semua pegawai memiliki latar belakang pengetahuan terkait *fraud*.

“Salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah belum meratanya kompetensi unit kerja dalam penerapan strategi anti *fraud*. Selain itu, belum semua pegawai memiliki sertifikasi di bidang ini,” ujar Bapak Nugroho (2025).

2. Sosialisasi anti *fraud* belum terlaksana rutin

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuniarti (2025) PT BPR Danagung sudah melakukan sosialisasi singkat kepada pegawainya, meskipun belum dalam bentuk pelatihan yang bersifat khusus. Hal ini bisa berdampak pada kurangnya pemahaman praktis dari pegawai terhadap cara mendeteksi dan menanggapi *fraud*, yang pada akhirnya bisa memperlambat proses pelaporan atau pencegahan.

4.3.2 Kendala

1. Sertifikasi atau pelatihan anti *fraud* belum tersedia menyeluruh

Sertifikasi atau pelatihan anti *fraud* yang belum tersedia menyeluruh menjadi penyebab belum meratanya kompetensi pegawai terkait pelaksanaan sistem anti *fraud*. Selain itu, penyebab lainnya karena ketersediaan lembaga penyedia pelatihan atau sertifikasi anti *fraud* yang masih terbatas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Nugroho.(2025) bahwa belum seluruh karyawan di unit-unit yang bertanggung jawab terhadap sistem anti *fraud* mendapatkan pelatihan yang sesuai. Di sisi lain, lembaga pelatihan yang dapat memberikan sertifikasi anti *fraud* pun belum tersedia secara luas.

2. Belum ada program pelatihan berkelanjutan yang terstandarisasi

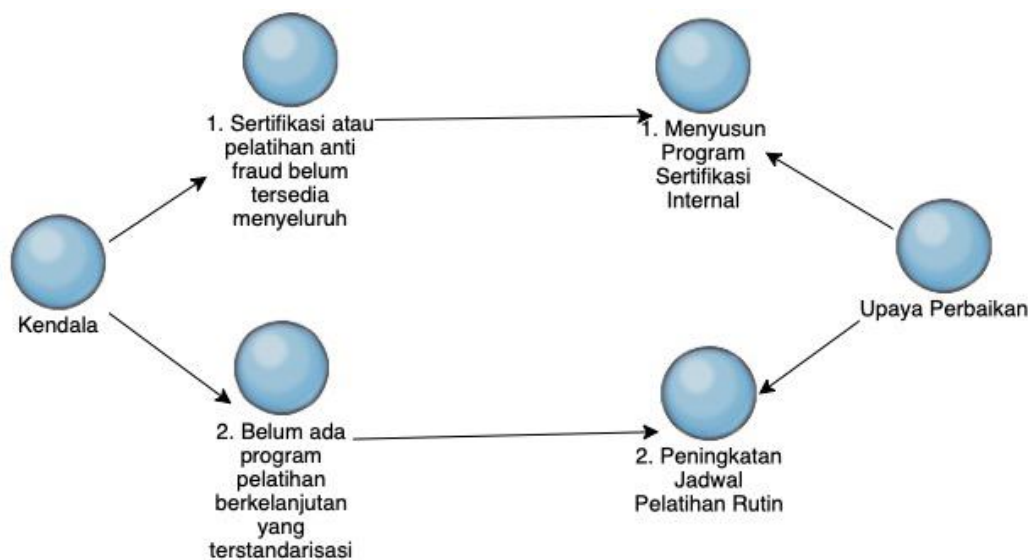
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuniarti (2025) PT BPR Danagung sudah melakukan sosialisasi singkat kepada pegawainya, meskipun belum dalam bentuk pelatihan yang bersifat khusus. PT BPR Danagung juga akan terus meningkatkan pelatihan semacam ini kedepannya.

4.4 Upaya Perbaikan Penerapan Sistem Anti *Fraud* pada PT BPR Danagung

Yogyakarta

Pembahasan dalam bagian ini difokuskan pada upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam penerapan sistem anti *fraud* PT BPR Danagung kedepannya. Dari data yang diolah pada NVivo didapat hasil sebagai berikut:

Gambar 4. 5 Peta Analisis Upaya Perbaikan Penerapan Sistem Anti *Fraud* pada PT BPR Danagung Yogyakarta



Sumber: Aplikasi NVivo 12

1. Menyusun program sertifikasi internal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nugroho (2025), sebagai langkah awal, PT BPR Danagung aktif mencari informasi dan berkoordinasi dengan asosiasi seperti Perbarindo, agar ke depan dapat tersedia pelatihan dan sertifikasi bagi pegawai mereka. Selain

itu, PT BPR Danagung juga dapat membuat modul pelatihan dasar dan lanjutan tentang anti *fraud* yang bisa dijadikan bahan pelatihan internal secara berkelanjutan.

2. Peningkatan jadwal pelatihan rutin

PT BPR Danagung dapat melakukan jadwal pelatihan rutin untuk seluruh level pegawai, termasuk simulasi kasus *fraud* sebagai bentuk pelatihan aplikatif. Selain itu, bagian SDM PT BPR Danagung juga dapat memotivasi pegawai dengan memberikan apresiasi atau penghargaan kepada mereka yang menunjukkan partisipasi aktif dalam kegiatan pelatihan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT BPR Danagung telah mengimplementasikan sistem anti *fraud* yang merujuk pada Buku Panduan Strategi Anti *Fraud* untuk BPR yang disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sistem ini juga mencakup ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yang bersifat wajib bagi seluruh BPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT BPR Danagung telah berkomitmen untuk mengurangi risiko terjadinya penipuan dan kecurangan di lingkungan kerja dengan menerapkan empat pilar utama dalam strategi anti *fraud*, yaitu pilar pencegahan, pilar pendeteksian, pilar pengungkapan, serta pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

2. PT BPR Danagung menghadapi beberapa tantangan dalam menerapkan mekanisme sistem anti *fraud* untuk mengurangi terjadinya tindak kecurangan. Beberapa kekurangan yang teridentifikasi antara lain yaitu kompetensi pegawai yang belum merata dan sosialisasi anti *fraud* yang belum terlaksana rutin. PT BPR Danagung juga mengalami kendala dalam penerapan sistem anti *fraud*, seperti sertifikasi atau pelatihan anti *fraud* yang belum tersedia menyeluruh dan belum ada program pelatihan berkelanjutan yang terstandarisasi.

3. Penulis memberikan upaya perbaikan yang dapat dilakukan oleh PT BPR Danagung untuk meningkatkan mekanisme penerapan sistem anti *fraud*, yaitu dengan menyusun program sertifikasi internal bekerja sama dengan asosiasi seperti Perbarindo agar pegawai dapat memiliki standar pengetahuan minimal terkait anti *fraud*. Selain itu, upaya lainnya dengan meningkatkan jadwal pelatihan rutin bagi pegawai sebagai bentuk pelatihan aplikatif.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Selama melakukan penelitian, penulis mengalami keterbatasan sebagai berikut:

1. Narasumber penelitian tidak dapat memberikan dokumen audit harian, bulanan, dan tahunan karena sifatnya privasi dan tidak untuk umum.

5.3 Saran Penelitian

Penulis memberikan saran bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, dapat menyusun program pelatihan dan sertifikasi terkait anti *fraud* secara lebih sistematis dan berkelanjutan guna meningkatkan penerapan sistem anti *fraud*.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas dengan melibatkan lebih dari satu BPR atau lembaga keuangan mikro lainnya agar diperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik sistem anti *fraud* di sektor BPR secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE Global. (2020). Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse: 2020 Global Fraud Study. *Association of Certified Fraud Examiners, Inc.*, 1–88. <https://acfepublic.s3-us-west-2.amazonaws.com/2020-Report-to-the-Nations.pdf>
- Anisa. (2012). Kajian : Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan Anisa Putri ., S . E ., M . M. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 2.
- Asmara, F. T., Riduan, A., & Priyadi, M. P. (2020). Kebijakan Dan Implementasi Strategi Anti-Fraud: Studi pada PT. Bank UOB Indonesia. *InFestasi*, 16(2), 135–147. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i2.8469>
- Bank Perekonomian Rakyat Danagung. (2023). *Standar Prosedur Operasional Strategi Anti Fraud*. 1–36.
- Denzin, N. K. (1978). The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods. *Aldine Publishing Company*. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315134543>
- Dewantara, Y. I. (2025). *Interview dengan Yustinus Indria Dewantara, diinterview oleh Aulia Nanda Zhafira*.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory; an assessment and review. *Academy of Management Review*, 14, 57–74.
- Firmansyah, M., Masrun, M., & Yudha S, I. D. K. (2021). Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 156–159. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.46>
- Himawan, A., & Siswanto, D. (2023). Anti Fraud Strategy Evaluation in Bank XYZ. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(6), 25–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7769801>
- Khoirunnisa, & Dwi Aristi, M. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Sebagai Strategi Anti Fraud di PT BRI Kanca Sudirman Pekanbaru. *Research In Accounting Journal*, 3(3), 521–526. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/raj%7C>

- Kholmi, M. (2011). Akuntabilitas dalam Perpektif Teori Agensi. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 2(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jibe.v2i02.4694>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th Edition)*. SAGE Publications.
- Nugroho, F. A. (2025). *Interview dengan Fitri Adi Nugroho, diinterview oleh Aulia Nanda Zhafira*.
- OJK. (2022). Panduan Strategi Anti-Fraud Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–118. [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Panduan-Strategi-Anti-Fraud-Bagi-Industri-Bank-Perkreditan-Rakyat-\(BPR\)/Buku Panduan Strategi Anti Fraud Bagi Industri Bank Perkreditan Rakyat \(BPR\).pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Panduan-Strategi-Anti-Fraud-Bagi-Industri-Bank-Perkreditan-Rakyat-(BPR)/Buku%20Panduan%20Strategi%20Anti%20Fraud%20Bagi%20Industri%20Bank%20Perkreditan%20Rakyat%20(BPR).pdf)
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>
- Soraya, R. (2024). Pelatihan Software NVivo untuk Penelitian Kualitatif bagi Mahasiswa STKIP Al Islam Tunas Bangsa. *Jurnal Pengabdian Pedagogika*, 3(01), 21–26.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The FWolfe, D. T. and Hermanson, D. R. (2004) ‘The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud: Certified Public Accountant’, *The CPA Journal*, 74(12), pp. 38–42. doi: DOI:raud Diamond : Considering the Four ElemWolfe, D. T. and Hermanson, D. R. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Yuniarti. (2025). *Interview dengan Yuniarti, diinterview oleh Aulia Nanda Zhafira*.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



SURAT KETERANGAN

Nomor : 217/S-Kel/BD/V/2025

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aulia Nanda Zhafira
No. Mahasiswa : 21312075
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis dan Ekonomika
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Telah melaksanakan penelitian/riset di PT BPR Danagung Yogyakarta untuk penulisan Skripsi dengan judul "Analisis Efektivitas Sistem Anti *Fraud* dalam Mencegah Risiko Kecurangan pada PT BPR Danagung Yogyakarta" sejak tanggal 1 Februari 2025 – 30 April 2025.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Sleman, 26 Mei 2025

↳ Direktur Utama, ✓

BANK DANAGUNG
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
Tedy Alamsyah



Scanned with CamScanner

PT Bank Perekonomian Rakyat Danagung
Jl. Solo KM. 11, Purwomartani, Sleman,
Yogyakarta, Indonesia
Tel. (+6274) 496187

LAMPIRAN 2

TRANSKRIP WAWANCARA 1

Narasumber : Bapak Fitri Adi Nugroho

Tanggal Wawancara: 10 Februari 2025

Jabatan : Direktur Kepatuhan

P: Bagaimana sistem anti *fraud* diterapkan di PT BPR Danagung Yogyakarta?

N: Sistem anti *fraud* kami diterapkan secara menyeluruh melalui manajemen risiko. Pengawasan dilakukan langsung oleh Direksi dan Dewan Komisaris, serta didukung oleh kecukupan kebijakan dan prosedur yang disusun oleh Divisi Kepatuhan. Selain itu, fungsi audit internal juga berperan penting untuk memastikan seluruh sistem berjalan efektif. Kami juga menerapkan empat pilar anti *fraud*, yakni pencegahan, deteksi, investigasi dan pemberian sanksi, serta kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.

P: Apa saja indikator keberhasilan dari sistem anti *fraud* yang digunakan?

N: Keberhasilan dari sistem ini bisa dilihat dari beberapa hal. Misalnya, apabila jumlah kasus *fraud* menurun dari waktu ke waktu, itu menunjukkan sistem bekerja dengan baik. Selain itu, seberapa cepat *fraud* bisa terdeteksi, bagaimana respons terhadap kejadian tersebut, dan tingkat pemahaman serta kepatuhan karyawan juga menjadi indikator penting. Kami juga menilai apakah sistem pengendalian internal mengalami peningkatan dan berfungsi sebagaimana mestinya.

P: Seberapa sering evaluasi dilakukan terhadap sistem anti *fraud*?

N: Evaluasi kami lakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Namun, bila terdapat laporan indikasi *fraud*, maka evaluasi akan dilakukan segera tanpa menunggu jadwal tahunan tersebut.

P: Siapa yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan anti *fraud*?

N: Tanggung jawab utama ada di tangan Direksi dan Dewan Komisaris. Mereka memastikan bahwa strategi anti *fraud* diterapkan sesuai dengan ketentuan dalam POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan.

P: Bagaimana perusahaan menciptakan budaya kerja yang mendukung pencegahan kecurangan?

N: Kami menciptakan budaya kerja anti *fraud* melalui berbagai cara. Mulai dari menyusun kebijakan dan prosedur anti *fraud*, melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan, hingga meminta mereka menandatangani Pakta Integritas. Selain itu, kami menyediakan sistem *whistleblowing*, memasukkan indikator anti *fraud* dalam penilaian kinerja, serta menjatuhkan sanksi yang tegas jika ditemukan pelanggaran.

P: Apakah karyawan diberikan insentif untuk melaporkan kecurangan?

N: Ya, kami berikan insentif dalam bentuk penilaian positif pada indikator KPI karyawan yang aktif melaporkan dugaan *fraud* secara tepat.

P: Bagaimana pelaksanaan sistem anti *fraud* secara detail di PT BPR Danagung Yogyakarta?

N: Pelaksanaan detail dari sistem ini mengacu pada regulasi terbaru yang dikeluarkan otoritas pada tahun 2024. Kami telah menyusun dan menyosialisasikan kebijakan dan prosedur anti *fraud*, meminta seluruh karyawan menandatangani Pakta Integritas, dan memasukkan evaluasi anti *fraud* dalam sistem penilaian kinerja.

P: Apakah ada kendala atau hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan sistem anti *fraud*?

N: Salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah belum meratanya kompetensi unit kerja dalam penerapan strategi anti fraud. Selain itu, belum semua pegawai memiliki sertifikasi di bidang ini.

P: Apa penyebab kendala itu bisa terjadi?

N: Penyebabnya adalah belum seluruh karyawan di unit-unit yang bertanggung jawab terhadap sistem ini mendapatkan pelatihan yang sesuai. Di sisi lain, lembaga pelatihan yang dapat memberikan sertifikasi anti *fraud* pun belum tersedia secara luas.

P: Bagaimana perusahaan mengatasi hambatan tersebut?

N; Sebagai langkah awal, kami aktif mencari informasi dan berkoordinasi dengan asosiasi seperti Perbarindo, agar ke depan dapat tersedia pelatihan dan sertifikasi yang dibutuhkan bagi staf kami.

P: Bagaimana perkembangan PT BPR Danagung Yogyakarta dari setiap tahunnya?

N: Secara umum, kami melihat tren positif dari tahun ke tahun. Salah satu indikatornya adalah menurunnya jumlah kasus *fraud*, yang menandakan bahwa pemahaman karyawan terhadap strategi anti *fraud* semakin meningkat.

P: Bagaimana ruang lingkup PT BPR Danagung Yogyakarta?

N: Kami beroperasi sebagai bank konvensional, namun tidak menyediakan layanan lalu lintas pembayaran. Dibandingkan dengan bank umum, ruang lingkup BPR lebih terbatas karena tidak boleh menerima giro, melakukan transaksi valuta asing, atau menyediakan layanan asuransi. Fokus utama kami ada pada penghimpunan dana, penyaluran kredit, kerja sama antar lembaga keuangan, dan kegiatan lainnya yang disetujui oleh OJK.

P: Bagaimana PT BPR Danagung Yogyakarta menjaga kepercayaan masyarakat?

N: Ada berbagai strategi yang kami terapkan. Mulai dari peningkatan jaringan dan kualitas layanan, pengembangan platform digital seperti DANAGUNGGO, hingga pelatihan SDM secara berkelanjutan. Kami juga memperkuat struktur dan daya saing perusahaan, serta menjaga hubungan baik dengan lembaga eksternal untuk mendukung pengembangan bisnis. Semua itu dilakukan agar kami tetap dipercaya oleh masyarakat.

P: Apa saja potensi yang bisa merugikan nasabah?

N: Beberapa hal yang bisa merugikan nasabah antara lain tindakan *fraud* yang

dilakukan oleh oknum internal, kurangnya transparansi informasi, serta pelayanan yang belum maksimal—misalnya dari sisi keterbatasan sistem teknologi.

P: Apakah sistem anti *fraud* perusahaan dianggap berhasil oleh para pemangku kepentingan?

N: Saat ini sistem anti *fraud* masih dalam tahap awal sosialisasi, mengingat POJK yang menjadi landasannya baru disahkan. Jadi, dibutuhkan waktu dan proses evaluasi berkala untuk benar-benar menilai keberhasilannya.

P: Apakah perusahaan memiliki rencana untuk meningkatkan sistem anti *fraud* di masa mendatang?

N: Tentu. Peningkatan sistem ini telah masuk dalam *roadmap* lima tahun ke depan perusahaan. Kami ingin memastikan bahwa strategi anti *fraud* bisa berjalan seiring dengan upaya penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

P: Bagaimana perusahaan melibatkan pemangku kepentingan dalam merumuskan sistem anti *fraud*?

N: Kami melibatkan berbagai unit kerja dengan cara membentuk tim lintas divisi. Mereka akan mengidentifikasi potensi risiko *fraud*, berdiskusi terbuka, dan menyumbang ide terkait penguatan sistem. Teknologi juga digunakan sebagai sarana kolaborasi agar proses lebih transparan dan terintegrasi.

P: Apakah ada buku pedoman khusus untuk bank mengenai sistem anti *fraud*?

N: Ya, kami sudah memiliki SPO Strategi Anti *Fraud* yang disahkan pada Desember 2023 dan direvisi kembali pada Agustus 2024.

P: Sejauh mana komitmen manajemen terhadap penerapan anti *fraud* di lingkungan perusahaan?

N: Komitmen manajemen terhadap anti fraud kami wujudkan secara nyata dalam berbagai aspek. Kami tidak hanya merancang sistem, tetapi juga memastikan implementasinya melalui arahan langsung dari jajaran Direksi. Pakta Integritas wajib ditandatangani, kebijakan disusun secara menyeluruh, dan sanksi dijalankan secara tegas. Manajemen secara aktif terlibat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terhadap setiap indikasi fraud yang muncul.

LAMPIRAN 3

TRANSKRIP WAWANCARA 2

Narasumber : Ibu Yuniarti

Tanggal Wawancara: 12 Februari 2025

Jabatan : Pejabat Eksekutif Satuan Kerja Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT

P: Apa saja tugas dan wewenang dari divisi kepatuhan?

N: Divisi kepatuhan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha bank berjalan sesuai dengan peraturan OJK dan perundang-undangan yang berlaku. Tugas mereka mencakup memantau perubahan regulasi, memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada unit kerja, serta mengevaluasi apakah setiap unit sudah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang baru. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab memberi rekomendasi, memastikan pelaksanaan prosedur kepatuhan, serta melakukan identifikasi dan pengendalian risiko kepatuhan. Dalam pelaksanaannya, divisi ini juga berkonsultasi dengan satuan audit internal dan melapor langsung kepada Direktur Kepatuhan.

P: Apa saja laporan yang dihasilkan di bagian kepatuhan?

N: Unit kerja kepatuhan merangkap fungsi Manajemen Risiko dan APU PPT. Mereka menghasilkan berbagai laporan, seperti laporan pelaksanaan tugas direktur kepatuhan, laporan penerapan kepatuhan, laporan evaluasi bulanan, opini manajemen risiko terhadap pengajuan kredit, serta laporan profil risiko dan tata kelola. Di samping itu, mereka juga menyusun laporan rutin seperti LTKT, LTKM, PPPSPM, serta laporan individual terkait pengkinian data dan penilaian risiko.

P: Bagaimana efektivitas dalam proses kerja divisi kepatuhan?

N: Secara umum, kami menilai bahwa proses kerja divisi kepatuhan cukup efektif. Mereka mampu mengarahkan setiap kegiatan operasional agar sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku, sekaligus menekan potensi risiko termasuk tindakan fraud.

P: Bagaimana menyikapi temuan dari SKAI dari sisi kepatuhan?

N: Setiap temuan dari SKAI kami tanggapinya secara serius. Unit kerja kepatuhan akan melakukan evaluasi untuk menentukan apakah perlu dilakukan revisi kebijakan, tambahan sosialisasi, atau penerapan sanksi. Langkah-langkah tersebut kemudian dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan unit kerja lain agar implementasinya berjalan efektif.

P: Bagaimana peran pengendalian internal? Keunggulannya seperti apa?

N: Pengendalian internal adalah mekanisme utama untuk menjaga harta kekayaan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan. Dengan sistem ini, kami bisa menekan dampak kerugian dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi organisasi. Pengendalian internal juga memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dan membantu menjaga reputasi perusahaan.

P: Apakah pengendalian internal sudah dirasa efektif?

N: Ya, sejauh ini kami menilai bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan efektif sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

P: Bagaimana proses mekanisme pengendalian internal?

N: Prosesnya melibatkan lima komponen utama yang saling berkaitan. Dimulai dari pengawasan manajemen dan budaya pengendalian, dilanjutkan dengan identifikasi risiko, pelaksanaan kegiatan pengendalian termasuk pemisahan fungsi, sistem informasi dan komunikasi yang andal, serta pemantauan secara terus-menerus untuk melakukan koreksi jika terjadi penyimpangan.

P: Bagaimana letak tanggung jawab pengendalian internal?

N: Tanggung jawab atas pengendalian internal ada pada seluruh karyawan sesuai dengan unit kerjanya masing-masing. Bila pengendalian melibatkan beberapa unit, maka koordinasi antar unit menjadi kunci agar pengendalian bisa berjalan efektif.

P: Seberapa besar keterlibatan karyawan dalam mendukung sistem anti fraud?

N: Semua karyawan kami libatkan dalam sistem ini. Mereka wajib menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa mereka akan menjauhi praktik fraud. Jika ada indikasi fraud dan seorang karyawan memilih untuk diam, maka ia dapat dianggap ikut terlibat dan akan dikenai sanksi.

P: Bagaimana perusahaan melibatkan karyawan dalam mencegah kecurangan?

N: Kami aktif meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan sosialisasi, menerapkan aturan dan sanksi tegas, serta memasukkan aspek kepatuhan terhadap anti fraud ke dalam penilaian KPI mereka. Dengan cara ini, kesadaran mereka terus terbentuk.

P: Apakah karyawan diberikan pelatihan untuk mengenali tanda-tanda kecurangan? Dan siapa yang bertanggung jawab memberikan pelatihan tersebut?

N: Sejauh ini kami sudah melakukan sosialisasi singkat, meskipun belum dalam bentuk pelatihan yang bersifat khusus. Pelatihan semacam ini akan terus kami tingkatkan di masa depan.

P: Apakah ada hambatan yang dialami karyawan dalam menggunakan sistem whistleblowing?

N: Sampai saat ini, kami tidak menemukan hambatan berarti. Sistem whistleblowing sudah berjalan dan dapat diakses oleh seluruh karyawan.

P: Bagaimana perusahaan melindungi identitas pelapor dalam sistem whistleblowing?

N: Kami sangat menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Komunikasi dilakukan melalui jalur yang aman dan dokumentasi laporan dikelola secara tertutup. Audit internal juga tidak akan menyebutkan bahwa kasus tertentu berasal dari laporan whistleblower, termasuk dalam laporan maupun materi pelatihan.

P: Apakah ada sanksi yang jelas terhadap pelaku kecurangan yang terbukti?

N: Ya, sanksi diberikan sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan, dan semuanya telah diatur secara jelas dalam Peraturan Perusahaan.

P: Seberapa besar pengaruh sistem anti fraud dalam mencegah risiko kecurangan?

N: Jika sistem ini disosialisasikan secara merata dan sanksi diterapkan secara tegas, maka pengaruhnya sangat besar. Sistem anti fraud dapat secara signifikan menekan dan bahkan mencegah risiko terjadinya kecurangan di lingkungan kerja.

P: Apakah ada Pakta Integritas yang ditandatangani oleh calon karyawan?

N: Ya, setiap karyawan wajib menandatangani Pakta Integritas di atas materai sebelum mulai bekerja. Ini menjadi bagian dari komitmen awal mereka terhadap prinsip kejujuran dan integritas.

P: Apakah perusahaan memiliki SOP khusus untuk menangani potensi kecurangan?

N: Tentu saja. Kami sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur penanganan kecurangan. SOP ini mencakup tahap pencegahan, proses pelaporan, hingga pemberian sanksi. Kami juga menyesuaikannya dengan ketentuan terbaru dari OJK maupun internal bank, agar selalu relevan dengan dinamika operasional.

P: Bagaimana proses identifikasi terhadap area rawan fraud dilakukan?

N: Identifikasi dilakukan secara berkala, terutama pada proses-proses yang melibatkan transaksi atau akses keuangan. Kami menerapkan sistem cross check antar unit dan menggunakan hasil evaluasi audit sebelumnya sebagai acuan. Dari situ, titik-titik rawan bisa dipetakan dan diberi pengendalian tambahan.

P: Apakah pelatihan terkait anti fraud diberikan secara rutin kepada karyawan?

N: Pelatihan kami berikan secara bertahap, baik melalui sosialisasi internal maupun pelatihan yang melibatkan pihak eksternal. Materi pelatihan tidak hanya mengenai

definisi fraud, tapi juga mencakup cara mengenali tanda-tandanya dan bagaimana melaporkannya. Ke depan, kami terus mengembangkan sistem pelatihan yang lebih terstruktur.

P: Apakah ada sistem pemantauan secara fisik seperti CCTV yang mendukung upaya pencegahan fraud?

N: Ya, kami menggunakan sistem CCTV di area-area strategis, terutama yang berhubungan dengan layanan nasabah dan operasional keuangan. Data rekaman tersebut bisa menjadi salah satu alat untuk mendeteksi indikasi penyimpangan serta mendukung proses investigasi bila diperlukan.

P: Bagaimana proses pelaporan dilakukan jika terdapat dugaan kecurangan?

N: Proses pelaporan bisa dilakukan secara langsung melalui atasan masing-masing atau melalui sistem whistleblowing yang sudah kami siapkan. Laporan akan diteruskan ke unit pengelola dan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Kami jaga agar identitas pelapor tetap rahasia untuk melindungi mereka dari tekanan atau intimidasi.

P: Bagaimana pemantauan dan evaluasi terhadap sistem anti fraud dilakukan?

N: Kami melakukan pemantauan berkala dan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem. Ini mencakup pengukuran hasil pelatihan, tingkat pelaporan,

serta dampak sistem terhadap pencegahan fraud. Bila ada kelemahan, akan segera ditindaklanjuti dengan perbaikan SOP atau penguatan pengendalian internal.

P: Bagaimana perusahaan mengidentifikasi kerawanan fraud dalam proses bisnis?

N: Identifikasi kerawanan kami lakukan melalui beberapa pendekatan. Salah satunya dengan meninjau proses bisnis yang memiliki celah dalam pengendalian, seperti pemrosesan transaksi tunai atau approval kredit. Selain itu, kami memanfaatkan data historis temuan audit, hasil evaluasi risiko, serta laporan dari whistleblowing untuk memetakan area rawan. Dengan pendekatan ini, kami bisa menyiapkan pengendalian yang lebih spesifik dan efektif.

P: Apakah perusahaan menerapkan kebijakan rotasi pegawai untuk mencegah kecurangan?

N: Ya, kami menerapkan kebijakan rotasi pegawai sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap praktik kecurangan. Dengan rotasi ini, kami ingin meminimalkan peluang penyimpangan yang bisa terjadi akibat seorang pegawai terlalu lama berada di satu posisi yang sama, khususnya di area yang sensitif seperti operasional dan keuangan. Selain itu, rotasi juga membantu memperkuat pemahaman lintas fungsi dan menjaga dinamika kerja yang sehat di lingkungan perusahaan.

P: Bagaimana penerapan prinsip *Know Your Employee* (KYE) di PT BPR Danagung Yogyakarta?

N: Penerapan prinsip *Know Your Employee* kami mulai sejak proses rekrutmen. Setiap pelamar akan melalui setidaknya dua tahap wawancara, yaitu bersama tim HRD dan user dari unit terkait. Proses ini kami gunakan untuk mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang calon karyawan. Kami meninjau riwayat kerja, melihat kecocokan kompetensi melalui CV dan sertifikasi yang dimiliki, serta menggali pengalaman kerja mereka sebelumnya. Ini berlaku untuk semua posisi, termasuk petugas keamanan.

Jika pelamar bukan fresh graduate, kami biasanya menanyakan alasan berhenti dari tempat kerja sebelumnya dan bagaimana pengalaman mereka selama bekerja di sana. Informasi tersebut kami cocokkan dengan dokumen yang dilampirkan. Selain itu, untuk memperkuat validasi, kami juga melakukan konfirmasi kepada atasan mereka di perusahaan sebelumnya. Langkah ini penting agar kami dapat memastikan integritas calon karyawan sejak awal.

LAMPIRAN 4

TRANSKRIP WAWANCARA 3

Narasumber : Bapak Yustinus Indria Dewantara

Tanggal Wawancara: 19 Februari 2025

Jabatan : Pejabat Eksekutif Satuan Kerja Audit Internal

P: Bagaimana sikap PT BPR Danagung Yogyakarta ketika terdapat temuan dalam proses audit?

N: Jika dalam audit ditemukan suatu permasalahan, kami biasanya menyampaikannya terlebih dahulu kepada unit kerja terkait saat sesi exit meeting. Di situ, pihak yang diaudit dapat memberikan tanggapan. Setelah itu, semua hasil—baik temuan, tanggapan, maupun komitmen dari pihak auditee—akan kami tuangkan ke dalam laporan hasil audit. Laporan ini kemudian kami sampaikan kepada Direktur Utama, yang nantinya bertanggung jawab memastikan semua tindak lanjut dijalankan sebagaimana mestinya.

P: Apakah perusahaan memiliki data historis tentang jenis dan dampak kecurangan yang pernah terjadi?

N: Ya, kami memiliki catatan historis terkait jenis dan dampak kecurangan yang pernah terjadi di lingkungan perusahaan. Data ini sangat berguna sebagai bahan evaluasi dan perbaikan sistem.

P: Bagaimana perusahaan mengevaluasi efektivitas sistem anti fraud yang telah diterapkan?

N: Evaluasi dilakukan melalui beberapa metode. Kami menganalisis data fraud untuk melihat tren dan jenis kejadian, mengukur performa sistem deteksi dan hasil audit rutin, serta menguji sistem pengendalian internal—terutama terkait akses sistem dan otorisasi transaksi. Kami juga mengevaluasi infrastruktur teknologi dan menggunakan metrik kinerja seperti tingkat deteksi fraud, kecepatan respons, serta tingkat pelaporan.

P: Apa saja tugas dan wewenang dari divisi Audit Internal (SKAI)?

N: Divisi Audit Internal memiliki peran strategis. Kami memeriksa apakah setiap kegiatan usaha sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Tugas kami mencakup pengawasan terhadap proses keuangan, pemeriksaan terhadap pemberian dan pengelolaan kredit, serta audit mendadak jika diperlukan. Selain itu, kami melakukan investigasi bila ditemukan indikasi penyimpangan dan menyampaikan laporan secara langsung kepada Direktur Utama.

P: Berapa lama pelaksanaan audit di PT BPR Danagung Yogyakarta?

N: Durasi audit tergantung pada ruang lingkup materi yang diperiksa. Namun rata-rata, audit terhadap satu bagian atau kantor cabang biasanya berlangsung antara 7 hingga 15 hari kerja.

P: Apakah ada contoh audit harian, bulanan dan tahunan?

N: Mohon maaf, informasi tersebut tidak dapat kami sampaikan lebih lanjut.

P: Berapa jumlah pelaksana audit di PT BPR Danagung Yogyakarta?

N: Saat ini tim kami terdiri dari lima orang, yaitu satu Pejabat Eksekutif Audit Internal dan empat staf pendukung.

P: Bagaimana fungsi dan prioritas utama dari divisi SKAI?

N: Fungsi utama SKAI adalah sebagai unit pelaksana pemeriksaan internal. Kami bertugas memantau kegiatan perusahaan, menilai dan menindaklanjuti laporan dari unit kerja maupun masyarakat, serta menjadi mitra strategis bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam mencapai tujuan perusahaan.

P: Apa tujuan dan manfaat proses audit di PT BPR Danagung Yogyakarta?

N: Audit bertujuan untuk memastikan tidak adanya penyimpangan, mencegah pemborosan atau tindakan fraud, dan membantu Direksi dalam memonitor aktivitas usaha. Audit juga memastikan keandalan data, kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan aset, efisiensi penggunaan modal, serta pencapaian tujuan dan program perusahaan.

P: Bagaimana perkembangan proses audit di PT BPR Danagung Yogyakarta?

Dan seperti apa contohnya?

N: Proses audit kami selalu menyesuaikan dengan ketentuan terbaru dari regulator maupun kebijakan internal perusahaan. Contohnya, bila ada regulasi baru dari OJK, kami segera menyesuaikan pendekatan dan fokus audit kami sesuai arahan tersebut.

P: Bagaimana peran Audit Internal dalam mewujudkan pencegahan serta pendeteksian fraud di PT BPR Danagung Yogyakarta?

N: Audit Internal adalah bagian dari sistem pengendalian internal yang independen dan objektif. Kami bertugas mendeteksi lebih dini potensi kecurangan dan meminimalkan dampak kerugiannya melalui pemeriksaan yang cermat dan menyeluruh.

P: Bagaimana bentuk pengelolaan kompetensi dan pengembangan auditor?

N: Pengembangan dilakukan melalui pelatihan internal dan eksternal. Kami mengikuti workshop, pelatihan daring dan luring, serta aktif di training center group. Selain itu, bank juga memiliki standar kompetensi dan rencana pendidikan berkelanjutan yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank.

P: Apa harapan ke depan mengenai SKAI?

N: Kami berharap SKAI bisa terus menjadi unit yang independen dan objektif, serta semakin profesional dalam perannya sebagai mitra dan konsultan manajemen, demi mendukung tercapainya tujuan perusahaan.

P: Bagaimana cara meminimalisir fraud berdasarkan teori The Fraud Triangle (tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi)?

N: Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab fraud, kami menerapkan pengendalian internal yang ketat, audit rutin, pembaruan SOP secara berkala, dan pelatihan mental anti fraud kepada pegawai. Evaluasi karyawan juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.

P: Apakah bank menerapkan surprise audit?

N: Ya, kami melaksanakan surprise audit baik di Kantor Pusat maupun seluruh

kantor cabang. Ini kami lakukan untuk menguji kesiapan dan konsistensi operasional serta sebagai langkah pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran.

P: Bagaimana proses investigasi dilakukan ketika ada laporan atau indikasi fraud?

N: Saat ada laporan atau indikasi fraud, kami melakukan pemeriksaan menyeluruh. Tahap awal biasanya berupa pengumpulan bukti pendukung, kemudian dilanjutkan dengan audit khusus. Pemeriksaan ini tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga pada sistem yang mungkin memungkinkan terjadinya fraud. Setelah itu, kami susun laporan dan rekomendasi tindak lanjut untuk manajemen.